

SKRIPSI

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA BERDASARKAN RASIO EFEKTIVITAS
DAN RASIO PERTUMBUHAN PADA KANTOR
DESA JAMPU KABUPATEN SOPPENG**



**YAYU SRI EVA
10572 05354 15**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

SKRIPSI

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA BERDASARKAN RASIO EFEKTIVITAS
DAN RASIO PERTUMBUHAN PADA KANTOR
DESA JAMPU KABUPATEN SOPPENG**

**YAYU SRI EVA
105720535415**

***Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana pada Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar***

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku,
adikku tersayang, teman seperjuanganku, dan spesial untuk keluargaku
yang selalu bertanya “kapan wisuda?”.



Tapi ingat, saat Orang Tua berkehendak maka itulah yang harus diikuti.

-Penulis



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan pada Kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng

Nama Mahasiswa : Yuyu Sri Eva

No. Stambuk/NIM : 1057 2053 5415

Program Studi : Manajemen

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan di depan panitia penguji skripsi Strata Satu (S1) pada tanggal 30 Agustus 2019 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 30 Agustus 2019

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Abdul Muttalib, SE.,MM.
NIDN : 0901125901

Syarifuddin, SE.,MM.
NIDN : 0929118403

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Ketua Program Studi,



Ismail Rasulong, SE.,MM.
NBM : 903078

Muh Nur Rasyid, SE.,MM.
NBM : 1085576



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Ibra Lt. 7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama Yayu Sri Eva, Nim 1057 2053 5415, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0011/SK-Y/61201/091004/2019 M, Tanggal 29 Dzulhijjah 1440 H / 30 Agustus 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

29 Dzulhijjah 1440 H
Makassar, _____
30 Agustus 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM (Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE.,MM (Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE.,MM (WD 1 Fak. Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji :
 1. Drs. Sultan Sarda, MM 
 2. Sri Andayaningsih, SE.,MM 
 3. Drs. Muhiddin Daweng, M.M 
 4. Dr. Andi Mappatempo Badawi, SE.,MM 

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Ismail Rasulong, SE.,MM.
NBM 903078



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 666 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yuyu Sri Eva

Stambuk : 1057 2053 5415

Program Studi: Manajemen

Dengan Judul : Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan pada Kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar dan telah diujikan pada tanggal 30 Agustus 2019.

Makassar, 30 Agustus 2019

Yang Membuat Pernyataan,

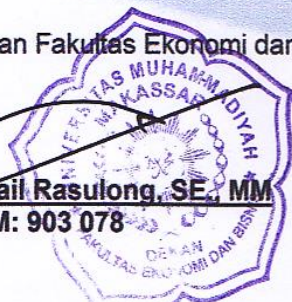


Yayu Sri Eva

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 903 078



Ketua Program Studi,

Muh. Nur R., SE., MM
NBM: 1085576

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan pada Kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak lepas dari berbagai hambatan dan rintangan, namun berkat bantuan dari Bapak Abdul Muttalib, SE.,MM, selaku pembimbing I dan Bapak Syafaruddin, SE.,MM, selaku pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan, dan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi selesai dengan baik, maka segala hambatan tersebut dapat teratasi dengan baik. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kedua Orang Tua yang senantiasa memberi semangat, perhatian, kasih sayang, motivasi, bimbingan, dukungan, dan doa tulus tanpa pamrih.

2. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Muh. Nur Rasyid, SE.,MM, Ketua Program Studi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
6. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Ibu Nurhafsa, S.Sos., MM, selaku Kepala Desa Jampu yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di kantor Desa Jampu.
8. Bapak Yusuf Syarifuddin, S.PdI, selaku Sekretaris Desa Jampu yang telah membantu penulis dalam membaca data laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
9. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya Program Studi Manajemen Angkatan 2015, kelas MAN 15 D yang tidak disebutkan namanya satu persatu yang selama ini bersama dalam suka dan duka menunjukkan kerja samanya dalam kegiatan perkuliahan maupun penulisan skripsi ini.
10. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa penulis tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini. Akhir kata, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh

dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Makassar, 10 Juli 2019

Penulis



ABSTRAK

YAYU SRI EVA, Tahun 2019. Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan pada Kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng, Skripsi Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Abdul Muttalib dan Pembimbing II Syafaruddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa baik kinerja keuangan pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan pada kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Data yang diolah adalah laporan keuangan Alokasi Dana Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dari tahun 2015 sampai dengan 2018. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumen dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kuantitatif dengan rumus : Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan Pemerintah Desa Jampu Kabupaten Soppeng sudah Baik dalam mengelola keuangan Alokasi Dana Desa. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan Rasio Efektivitas dikategorikan Cukup Efektif, karena rata-rata efektivitasnya di atas 80% yaitu 82,015%. Sedangkan Rasio Pertumbuhan tumbuh secara positif. Rata-rata Rasio Pertumbuhan Pendapatan Alokasi Dana Desa sebesar 67,69% dan Rasio Pertumbuhan Belanja Alokasi Dana Desa sebesar 61,72%.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Rasio Efektivitas, Rasio Pertumbuhan.

ABSTRACT

YAYU SRI EVA, 2019. *Analysis of Financial Performance Management of Village Fund Allocation based on Effectiveness Ratio and Growth Ratio at Jampu Village Office in Soppeng Regency, Thesis Faculty of Economics and Business Department of Management Muhammadiyah University of Makassar. Guided by Advisor I Abdul Muttalib and Advisor II Syafaruddin.*

This study aims to find out how well the financial performance of the management of village funds allocation is based on the effectiveness ratio and growth ratio in the office of Jampu Village, Soppeng Regency. The type of research used in this study is descriptive quantitative. The data processed is the Village Fund Allocation Funding report on the Village Revenue and Expenditure Budget from 2015 to 2018. The data collection techniques used are document techniques and library studies. The data analysis technique used in this study is quantitative descriptive with the formula: Effectiveness Ratio and Growth Ratio.

The results of the study showed that in general the financial performance of the Jampu Village Government of Soppeng District was good in managing the Village Fund Allocation finances. This can be seen from the results of the calculation of the Effectiveness Ratio categorized as Effective, because the average effectiveness is above 80%, which is 82.015%. While the growth ratio grows positively. The Average Growth Rate of Village Fund Allocation Income is 67.69% and the Village Fund Allocation Expenditure Growth Ratio is 61.72%.

Keywords : *Financial Performance, Effectiveness Ratio, Growth Ratio.*



DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
A. Tinjauan Teori	4
1. Manajemen Keuangan	4
2. Analisis Laporan Keuangan	6
3. Analisis Kinerja Keuangan	10

4. Pengelolaan Alokasi Dana Desa	14
5. Rasio Efektivitas	19
6. Rasio Pertumbuhan	22
B. Tinjauan Empiris	23
C. Kerangka Konsep	29
D. Hipotesis	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
C. Definisi Operasional dan Pengukuran	32
D. Populasi dan Sampel	33
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Teknik Analisis	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	35
1. Sejarah Singkat	35
2. Visi dan Misi Kantor Desa Jampu	36
3. Struktur Organisasi	37
4. Uraian Tugas	38
B. Hasil Penelitian	43
C. Pembahasan	50
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Penilaian Efektivitas	21
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu	23
Tabel 4.1	Laporan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng.....	44
Tabel 4.2	Rasio Efektivitas Kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng	45
Tabel 4.3	Laporan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng.....	47
Tabel 4.4	Rasio Pertumbuhan Kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng	48



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Konsep	29
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Kantor Desa Jampu	37
Gambar 4.2	Rasio Efektivitas Kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng	46
Gambar 4.3	Rasio Pertumbuhan Pendapatan ADD Kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng	49
Gambar 4.4	Rasio Pertumbuhan Belanja ADD Kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng	49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Permohonan Izin Penelitian
2. Surat Rekomendasi Penelitian
3. Surat Keterangan Penelitian
4. Laporan APBDesa 2015
5. Laporan APBDesa 2016
6. Laporan APBDesa 2017
7. Laporan APBDesa 2018
8. Biografi Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan desa yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu desa. Pengelolaan keuangan desa tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal tetapi juga harus didukung oleh keuangan yang memadai.

Pengelolaan keuangan desa sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu desa karena mampu berkembang atau tidaknya, tergantung pada cara pengelolaan keuangannya. Pengelolaan keuangan desa yang baik akan menunjukkan kinerja pemerintah desa yang baik pula.

Akan tetapi pada berbagai kasus sering timbul ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja keuangan yang ada. Dimana jumlah anggaran yang besar berbanding terbalik dengan jumlah anggaran yang terealisasikan.

Besarnya anggaran alokasi dana desa yang diberikan ke desa membuat isu di kalangan masyarakat desa tersebut. Hal ini didasari ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja keuangan yang ada pada saat ini. Hingga detik ini, bangsa ini masih belum lepas dari cengkaman korupsi. Dengan fakta banyaknya kasus korupsi sama sekali bukan rahasia lagi. Isu ini terus merebak sehingga perangkat desa harus menghadapi meja hijau dan penjara akibat menyalahgunakan dana desanya.

Kecurangan terhadap keuangan desa dapat terjadi kapan saja dan tanpa memperhatikan sumber dananya. Jika berkaitan dengan penyalahgunaan alokasi dana desa, maka perbuatan tersebut bisa dikategorikan korupsi.

Pemerintah desa harus dapat memanfaatkan dana peruntukannya guna memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa. Pemahaman mengenai pengelolaan alokasi dana desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki kepala desa dan perangkat desa. Prinsip dasar pengelolaan alokasi dana desa dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa serta tugas dan tanggung jawab para pengelola.

Untuk mengetahui seberapa baik dan besarnya suatu pengelolaan alokasi dana desa maka perlu dilakukan analisis kinerja keuangan. Analisis kinerja keuangan ini sangat penting karena dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kinerja keuangan di masa yang akan datang, menunjukkan pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan, mengevaluasi kinerja keuangan, membantu mengungkap dan memecahkan masalah yang ada.

Analisis kinerja keuangan dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode yang lain. Dalam hal ini, rasio yang digunakan oleh penulis pada Kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng yaitu rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan. Rasio ini digunakan untuk memberikan gambaran informasi mengenai kinerja keuangan selama kurun waktu 4 tahun terakhir (tahun 2015-2018).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan pada Kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: “Seberapa baik kinerja keuangan pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan pada kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa baik kinerja keuangan pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan pada kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai analisis kinerja keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan pada Kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng, serta juga diharapkan dapat menambah referensi dalam penyusunan penelitian selanjutnya atau penelitian-penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan dan informasi kepada kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng dalam kaitannya mengenai kinerja keuangan dalam mengelola alokasi dana desa di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Manajemen Keuangan

Menurut Anton Athoillah (2013:13) dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Manajemen mengatakan bahwa manajemen berasal dari kata "*to manage*" yang berarti mengatur, mengurus, atau mengelola. Dari arti tersebut, secara substansif, makna manajemen mengandung unsur-unsur kegiatan yang bersifat pengelolaan. Dengan demikian, muncul pertanyaan apa yang dikelola, bagaimana mengelolanya, untuk apa dikelola, dan siapa yang bertindak sebagai pengelola.

Malayu S.P. Hasibuan menjelaskan bahwa manajemen dalam bahasa Inggris, artinya *to manage*, yaitu mengatur. Oleh karena itu, menurutnya, pertanyaan yang muncul adalah apa yang diatur, mengapa harus diatur, siapa yang mengatur, bagaimana mengaturnya, dan dimana harus diatur. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjelaskan objek pengelolaan manajemen. Oleh sebab itu, manajemen berkaitan dengan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian, yang di dalamnya terdapat upaya anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan mengarahkan sumber daya organisasi yang dimiliki.

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2017:9-10) dalam bukunya yang berjudul Manajemen Keuangan Teori, Aplikasi dan Hasil Penelitian mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap sumber daya

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan suatu perusahaan. Untuk mencapai tujuannya, perusahaan harus dapat mengendalikan dan mengontrol kegiatan operasional di perusahaannya dengan memanfaatkan pihak-pihak yang berada dalam perusahaan yang memiliki wewenang, tugas dan tanggungjawab dalam pencapaian tujuan tersebut.

Keuangan adalah suatu aktivitas yang berhubungan dengan pemerolehan dan pengelolaan dana secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh.

Manajemen keuangan adalah suatu aktivitas yang dilakukan dengan usaha-usaha untuk memperoleh dana dengan biaya-biaya yang diatur seminimal mungkin dan mengelola dana tersebut secara efektif untuk mencapai tujuan perusahaan.

Menurut Musthafa (2017:1) dalam bukunya yang berjudul Manajemen Keuangan mengatakan bahwa dalam mempelajari manajemen keuangan (*financial management*) kita diharapkan dapat menjelaskan tentang beberapa keputusan yang harus dilakukan, yaitu keputusan tentang investasi (*investment decision*), keputusan pendanaan atau keputusan pemenuhan kebutuhan dana (*financing decision*), dan keputusan kebijakan deviden (*dividend policy*) yang biasa juga disebut keputusan pembagian keuntungan (*distribution decision*).

Manajemen keuangan merupakan suatu bidang pengetahuan yang cukup menyenangkan sekaligus menantang karena mereka yang senang dalam bidang manajemen keuangan akan mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh pekerjaan seperti *corporate finance managers*, *perbankan*, *real estate*, perusahaan asuransi, bahkan sektor pemerintahan yang lain, sehingga karir mereka akan berkembang.

2. Analisis Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2011: 66-72) dalam bukunya yang berjudul Analisis Laporan Keuangan mengatakan bahwa Agar laporan keuangan menjadi lebih berarti sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak, perlu dilakukan analisis laporan keuangan. Bagi pihak pemilik dan manajemen, tujuan utama analisis laporan keuangan adalah agar dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan saat ini. Dengan mengetahui posisi keuangan, setelah dilakukan analisis laporan keuangan secara mendalam, akan terlihat apakah perusahaan dapat mencapai target yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak.

Pada akhirnya bagi pihak pemilik dan manajemen, dengan mengetahui posisi keuangan dapat merencanakan dan mengambil keputusan yang tepat tentang apa yang harus dilakukan ke depan. Perencanaan ke depan dengan cara menutupi kelemahan yang ada, mempertahankan posisi yang sudah sesuai dengan yang diinginkan dan berupaya untuk meningkatkan lagi kekuatan yang sudah diperolehnya selama ini.

Analisis laporan keuangan perlu dilakukan secara cermat dengan menggunakan metode dan teknik analisis yang tepat sehingga hasil yang diharapkan benar-benar tepat pula. Kesalahan dalam memasukkan angka atau rumus akan berakibat pada tidak akuratnya hasil yang hendak dicapai. Kemudian, hasil perhitungan tersebut, dianalisis dan diinterpretasikan sehingga diketahui posisi keuangan yang sesungguhnya. Kesemuanya ini harus dilakukan secara teliti, mendalam, dan jujur.

Ada beberapa tujuan dan manfaat bagi berbagai pihak dengan adanya analisis laporan keuangan. Secara umum dikatakan bahwa tujuan dan

manfaat analisis laporan keuangan adalah :

- a. untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode;
- b. untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan;
- c. untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki;
- d. untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini;
- e. untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal;
- f. dapat juga digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

Dalam praktiknya, terdapat dua macam metode analisis laporan keuangan yang biasa dipakai, yaitu sebagai berikut.

a. Analisis Vertikal (Statis)

Analisis vertikal merupakan analisis yang dilakukan terhadap hanya satu periode laporan keuangan saja. Analisis dilakukan antara pos-pos yang ada, dalam satu periode. Informasi yang diperoleh hanya untuk satu periode saja dan tidak diketahui perkembangan dari periode ke periode tidak diketahui.

b. Analisis Horinzontal (Dinamis)

Analisis horizontal merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Dari hasil analisis ini akan terlihat perkembangan perusahaan dari periode yang lain.

Kemudian, di samping metode yang digunakan untuk menganalisis laporan keuangan, terdapat beberapa jenis-jenis teknik analisis laporan keuangan.

Adapun jenis-jenis teknik analisis laporan keuangan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- a) Analisis perbandingan antara laporan keuangan;
- b) Analisis trend;
- c) Analisis persentase per komponen;
- d) Analisis sumber dan penggunaan dana;
- e) Analisis sumber dan penggunaan kas;
- f) Analisis rasio;
- g) Analisis kredit;
- h) Analisis laba kotor;
- i) Analisis titik pulang pokok atau titik impas (*break even point*).

Penjelasan masing-masing teknik analisis laporan keuangan di atas sebagai berikut.

Analisis perbandingan antara laporan keuangan merupakan analisis ini dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan lebih dari satu periode. Artinya minimal dua periode atau lebih. Dari analisis ini akan dapat diketahui perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan yang terjadi dapat berupa kenaikan atau penurunan dari masing-masing komponen analisis. Dari perubahan ini terlihat masing-masing kemajuan atau kegagalan dalam mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Secara umum dari hasil analisis ini akan terlihat antara lain :

- angka-angka dalam rupiah;
- angka-angka dalam presentase;

- kenaikan atau penurunan jumlah rupiah;
- kenaikan atau penurunan baik dalam rupiah maupun dalam persentase.

Analisis trend atau tendensi merupakan analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam persentase dari periode ke periode.

Analisis persentase per komponen merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui persentase investasi terhadap masing-masing komponen yang ada dalam laporan keuangan.

Analisis sumber dan penggunaan dana dilakukan untuk mengetahui sumber-sumber dana perusahaan, serta, penggunaan dana dalam suatu periode. Juga untuk mengetahui jumlah modal kerja dan sebab-sebab berubahnya modal kerja perusahaan dalam suatu periode.

Analisis sumber dan penggunaan kas digunakan untuk mengetahui sumber dan penggunaan uang kas dalam suatu periode. Kemudian, untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas.

Analisis rasio digunakan untuk mengetahui hubungan pos-pos yang ada dalam satu laporan keuangan atau pos-pos antara laporan keuangan neraca dan laba rugi.

Analisis kredit merupakan analisis yang digunakan untuk menilai layak tidaknya suatu kredit dikururkan oleh lembaga keuangan seperti bank. Dalam analisis ini digunakan beberapa cara alat analisis yang digunakan. Kemudian, analisis juga digunakan untuk meningkatkan penjualan kredit.

Analisis laba kotor digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor dari periode ke satu periode. Kemudian, untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya laba kotor tersebut antara periode.

Analisis titik pulang pokok (*break even point*) digunakan untuk mengetahui pada kondisi beberapa penjualan atau prodeuk dilakukan dan perusahaan tidak mengalami kerugian. Kegunaan analisis ini adalah untuk menentukan jumlah keuntungan pada berbagai tingkat penjualan.

3. Analisis Kinerja Keuangan

Menurut Irham Fahmi (2014:226) dalam bukunya yang berjudul Manajemen Teori, Kasus, dan Solusi mengatakan bahwa kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat *profit oriented* dan *non profit oriented* yang dihasilkan selama satu periode waktu. Secara lebih tegas Armstrong dan Baron mengatakan kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategi organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi (Armstrong dan Baron, 1998:15). Lebih jauh Indra Bastian menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi.

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2017:71-73) dalam bukunya yang berjudul Analisis Laporan Keuangan Teori, Aplikasi dan Hasil Penelitian mengatakan bahwa Kinerja merupakan hasil dari evaluasi terhadap pekerjaan yang telah selesai dilakukan, hasil pekerjaan tersebut dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama. Setiap pekerjaan yang telah selesai dilakukan perlu dilakukan penilaian/pengukuran secara periodik.

Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan

laporan keuangan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran tersebut dapat menggunakan sistem penilaian (*rating*) yang relevan. *Rating* tersebut harus mudah digunakan sesuai dengan yang akan diukur, dan mencerminkan hal-hal yang memang menentukan kinerja. Pengukuran kinerja keuangan juga berarti membandingkan antara standar yang telah ditetapkan (misalnya berdasarkan peraturan menteri keuangan) dengan kinerja keuangan yang ada dalam perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan bersifat kuantitatif dengan berdasarkan pada laporan keuangan.

Adapun manfaat dari pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengukur prestasi yang telah diperoleh suatu organisasi secara keseluruhan dalam suatu periode tertentu, pengukuran ini mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.
- b) Untuk menilai pencapaian per departemen dalam memberikan kontribusi bagi perusahaan secara keseluruhan.
- c) Sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.
- d) Untuk memberikan petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.
- e) Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.

Menurut Jumingan (2014:240) dalam bukunya yang berjudul Analisis Laporan Keuangan mengatakan bahwa analisis kinerja keuangan atau analisis keuangan bank merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap keuangan bank menyangkut *review* data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan bank pada suatu periode tertentu.

Dengan demikian, prosedur analisis meliputi tahapan sebagai berikut :

a. *Review* data laporan

Aktivitas penyesuaian data laporan keuangan terhadap berbagai hal baik sifat atau jenis perusahaan yang melaporkan maupun sistem akuntansi yang berlaku. Sistem akuntansi yang diterapkan dalam memberi pengakuan terhadap pendapatan dan biaya akan menentukan jumlah pendapatan maupun laba yang dihasilkan perusahaan.

b. Menghitung

Dengan menggunakan berbagai metode dan teknik analisis dilakukan perhitungan-perhitungan, baik metode perbandingan, persentase komponen, analisis rasio keuangan, dan lain-lain. Dengan metode atau teknik apa yang akan digunakan dalam perhitungan sangat bergantung pada tujuan analisis.

c. Membandingkan atau Mengukur

Langkah berikutnya setelah melakukan perhitungan adalah membandingkan atau mengukur. Langkah ini diperlukan guna mengetahui kondisi hasil perhitungan tersebut apakah sangat baik, baik, sedang, kurang baik, dan seterusnya.

d. Menginterpretasi

Interpretasi merupakan inti dari proses analisis sebagai perpaduan antara hasil perbandingan/pengukuran dengan kaidah teoritis yang berlaku. Hasil interpretasi mencerminkan keberhasilan maupun permasalahan apa yang dicapai perusahaan dalam pengelolaan keuangan.

e. Solusi

Langkah terakhir dari rangkaian prosedur analisis. Dengan memahami *problem* keuangan dihadapi perusahaan akan menempuh solusi yang tepat.

Analisa laporan keuangan adalah suatu proses dalam rangka membantu menganalisis atau mengevaluasi keadaan keuangan perusahaan, hasil-hasil operasi perusahaan masa lalu dan masa depan, adapun tujuan analisis laporan keuangan adalah untuk menilai kinerja yang dicapai perusahaan selama ini dan mengestimasi kinerja perusahaan pada masa mendatang. Analisa laporan keuangan juga dapat melihat pertumbuhan kinerja keuangan dari tahun ke tahun (V. Wiratna Sujarweni, 2017:6).

Menurut Hery (2014:22) dalam bukunya yang berjudul Analisis Laporan Keuangan mengatakan bahwa analisis rasio merupakan salah satu alat analisis keuangan yang paling populer dan banyak digunakan. Meskipun perhitungan rasio hanyalah merupakan operasi aritmatika sederhana, namun hasilnya memerlukan interpretasi yang tidak mudah.

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2017:109) dalam bukunya yang berjudul Manajemen Keuangan Teori, Aplikasi dan Hasil Penelitian mengatakan bahwa dengan menggunakan metode analisis seperti berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberikan gambaran tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan. Tujuan melakukan analisis rasio keuangan adalah untuk dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan, menilai kinerja laporan keuangan perusahaan dalam memberdayakan seluruh sumber daya yang ada untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Berdasarkan uraian dan definisi yang dikemukakan para ahli, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan analisis kinerja keuangan adalah proses menghitung, mendeskripsikan, dan memberi solusi terhadap hasil kerja yang dicapai suatu instansi pada periode tertentu.

4. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

1) Desa

Desa merupakan bentuk dari pemerintahan yang paling kecil di Indonesia yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani maupun peternak, dan tingkat pendidikannya pun biasanya relatif rendah. Dan juga, desa merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat dalam melaksanakan layanan publik, peraturan umum, dan pemberdayaan (Hehamahua, 2015). Karena mayoritas penduduk Indonesia tinggal di desa, yang dikutip dalam skripsi Riska Apriliana (2017:34-56).

Desa Berkembang adalah desa potensial menjadi desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan (Permendes No. 22 Tahun 2016).

Desa Maju adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa Mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan (Permendes No. 22 Tahun 2016).

2) Prioritas Alokasi Dana Desa

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

Dana Desa harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (PP No. 60 Tahun 2014 Pasal 19). Pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Prinsip prioritas penggunaan Dana Desa (DJPPMD, 2015) yaitu:

- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
- b. Kebutuhan Prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa; dan
- c. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

Faktor yang harus diperhatikan dalam pembangunan desa menurut Tipologi Desa (DJPPMD, 2015) adalah:

- a. Desa Tertinggal atau Sangat Tertinggal adalah tentang sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan; dan akses kehidupan masyarakat desa.
- b. Desa Berkembang adalah tentang sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar pendidikan; dan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar kesehatan.
- c. Desa Maju atau Mandiri adalah tentang sarana dan prasarana yang berdampak pada ekonomi desa dan investasi desa; prakarsa desa membuka lapangan kerja; teknologi tepat guna; dan investasi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat adalah untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa. Prioritas kegiatan pemberdayaan berdasarkan Tipologi Desa (DJPPMD, 2015) adalah sebagai berikut :

- a. Desa Tertinggal atau Sangat Tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada pembukaan lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa.
- b. Desa Berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan.
- c. Desa Maju atau Mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lambung ekonomi atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumber daya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan.

3) Penyaluran Dana Desa

Keuangan desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan

kewajiban. Hak dan kewajiban ini dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Asas pengelolaan keuangan desa yaitu Transparansi, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Transparansi berarti terbuka dan tidak ada yang ditutupi. Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, moral dan hukum. Partisipatif berarti mengutamakan keterlibatan masyarakat. Kemudian Tertib dan Disiplin Anggaran berarti konsisten, tepat waktu, tepat jumlah dan taat asas (DJBPD, 2016).

Pengelolaan Dana Desa meliputi tiga kegiatan penting yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban.

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Kegiatan perencanaan ini dilakukan untuk menyusun kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Pertama, tiap dusun akan mengadakan Musyawarah Dusun (Musdus) untuk menampung usulan-usulan masyarakat mengenai program kerja apa saja yang akan dilakukan untuk tahun yang berkenaan (Permendagri No. 113 tahun 2014).

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (Pemerintah Desa). Untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik Alokasi Dana Desa (ADD) wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan,

besaran anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD) maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan seperti yang telah disepakati dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) (Diansari, 2015).

c. Pertanggungjawaban

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Alokasi dana desa dimaksudkan untuk memberikan pembiayaan program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Marselina Ara Lili (2018:6-10) yang dikutip dari artikel ilmiah menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu sumber pendapatan desa, yang diterima secara bertahap dalam setiap tahunnya. Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa. Sumber Alokasi Dana Desa (ADD) ini berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.

Supaya setiap kegiatan yang dibiayai mencapai sasarnya yang sesuai dengan kepentingan dan harapan masyarakat di desa bersangkutan, maka dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini harus dipenuhi beberapa prinsip diantaranya adalah :

- a) Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari alokasi dana desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip : dari, oleh dan untuk masyarakat,

- b) Seluruh kegiatan dan penggunaan alokasi dana desa harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum,
- c) Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui alokasi dana desa diharapkan mampu untuk meningkatkan ketersediaan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dan mendesak untuk dipenuhi. Pengambilan keputusan untuk menentukan setiap jenis kegiatan yang dibiayai dengan alokasi dana desa ini harus dilakukan melalui jalan musyawarah dan mufakat,
- d) Alokasi dana desa harus di catat di dalam anggaran pendapatan dan belanja desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Alokasi Dana Desa (ADD) diberikan kepada desa dengan tujuan untuk :

- a) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan;
- b) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c) Meningkatkan pemerataan pendapatan kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; dan
- d) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

5. Rasio Efektivitas

Alat rasio keuangan yang digunakan adalah analisis rasio yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (Halim, 2014:267) yaitu :

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Menurut Rahardjo (2011:170) dalam jurnal Mega Oktavia Ropa (2016:741) mengatakan efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, suatu hasil dikatakan efektif jika hasil tersebut benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk ketentuan yang berlaku. Efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Faud (2016:140) mengatakan rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil.

Rigel Nurul Fathah (2017:36) dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau yang dianggarkan sebelumnya. Rumus rasio ini sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2.1
Penilaian Efektivitas

Kriteria Efektivitas	Persentase Efektivitas
Sangat efektif	Diatas 100%
Efektif	90% -100%
Cukup efektif	80% - 90%
Kurang efektif	60% - 80%
Tidak efektif	Kurang dari 60%

Sumber : Mohammad Mahsun (2016:130)

Menurut Nurhayati (2015:58), Rasio efektivitas pendapatan asli daerah dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan target penerimaan pendapatan asli daerah (dianggarkan).

Menurut Mahmudi (2010:143) dalam jurnal (Ni Ketut Erna Rahmawati dan I Wayan Putra, 2016:1779), Rasio efektivitas pendapatan asli daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan asli daerah sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio efektivitas pendapatan asli daerah dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan target penerimaan pendapatan asli daerah atau yang dianggarkan sebelumnya. Rasio efektivitas adalah tingkat perolehan hasil suatu kegiatan yang disesuaikan dengan target yang ditentukan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rasio efektivitas adalah menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan Alokasi Dana Desa (ADD) yang direncanakan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan.

6. Rasio Pertumbuhan

Menurut Kasmir (2013:116) dalam bukunya yang berjudul Pengantar Manajemen Keuangan mengatakan bahwa rasio pertumbuhan (*growth ratio*), merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya.

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah desa dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif.

Menurut Arief Sugiono (2009:68) dalam bukunya yang berjudul Manajemen Keuangan untuk Praktisi Keuangan mengatakan bahwa rasio pertumbuhan, bertujuan mengukur kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kedudukannya dalam pertumbuhan perekonomian dan dalam industri.

Menurut Welio Wonda (2016:198), Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Semakin besar rasio pertumbuhan atau realisasi penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya maka kinerja pemerintah daerah dinyatakan baik.

Arthaingan H. Mutiha (2016:110) dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010 - 2014, Rasio pertumbuhan (*Growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode.

Rumus rasio pertumbuhan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Pendapatan } X_{n-1}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja } X_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan : X_n = Tahun yang dihitung

X_{n-1} = Tahun sebelumnya

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rasio pertumbuhan menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam mempertahankan dan meningkatkan posisi ekonominya. Rasio pertumbuhan dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami peningkatan.

B. Tinjauan Empiris

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	Rigel Nurul Fathah (2017)	Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan daerah Kabupaten Gunung Kidul jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD tergolong Efektif, karena rata-rata

No	Nama/ Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
		Daerah Kabupaten Gunung Kidul		<p>efektivitasnya di atas 100% yaitu 131,8%. Rasio Efisiensi Keuangan daerah belum Efisien karena selama lima tahun berturut-turut skalanya di atas 100%. Rata-rata rasio Efisiensi Keuangan Daerah selama lima tahun yaitu 109,8%. Rasio Keserasian masih banyak mengalokasikan Belanja Operasi daripada Belanja Modalnya, rata-rata rasionya sebesar 71,26%, dibandingkan dengan rata-rata rasio Belanja Modal sebesar 9,92%. Rasio Pertumbuhan PAD tumbuh secara positif. Rata-rata kemandiriannya masih tergolong rendah sekali dan dalam kategori pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat</p>

No	Nama/ Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
				<p>masih sangat dominan dibandingkan pemerintah daerah, karena masih tergolong interval 0-25%.</p>
2	Arthaingan H.Mutiha (2016)	<p>Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010 -2014</p>	<p>Deskriptif Kuantitatif</p>	<p>Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan rata-rata kinerja pengelolaan kota Bogor berdasarkan rasio keuangan adalah baik. Dilihat dari tabel bahwa secara keseluruhan hubungan kinerja keuangan Kota Bogor seperti rasio derajat desentralisasi selama 5 tahun terakhir (tahun 2010-2014), maka angka rasio ini mencapai 23,09 %. Sementara rasio tingkat kemandirian memiliki rata-rata 31,89%. Rata-rata rasio efektif keuangan daerahnya sebesar 111%. Selanjutnya rasio pertumbuhan Kota Bogor</p>

No	Nama/ Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
				memiliki kinerja pengelolaan keuangan daerah yang baik terbukti dari rasio pertumbuhan yang positif setiap tahunnya.
3	Mega Oktavia Ropa (2016)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan	Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio efektivitas dapat dikategorikan efektif, rasio efisiensi kurang efisien, rasio kemandirian pengelolaan keuangan daerah masih rendah, rasio aktifitas kurang baik, dan rasio pertumbuhan baik, untuk pertumbuhan pendapatan asli daerah dan pendapatan, dan kurang baik untuk pertumbuhan belanja rutin dan belanja pembangunan. Dengan demikian, kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan analisis rasio keuangan cukup baik.

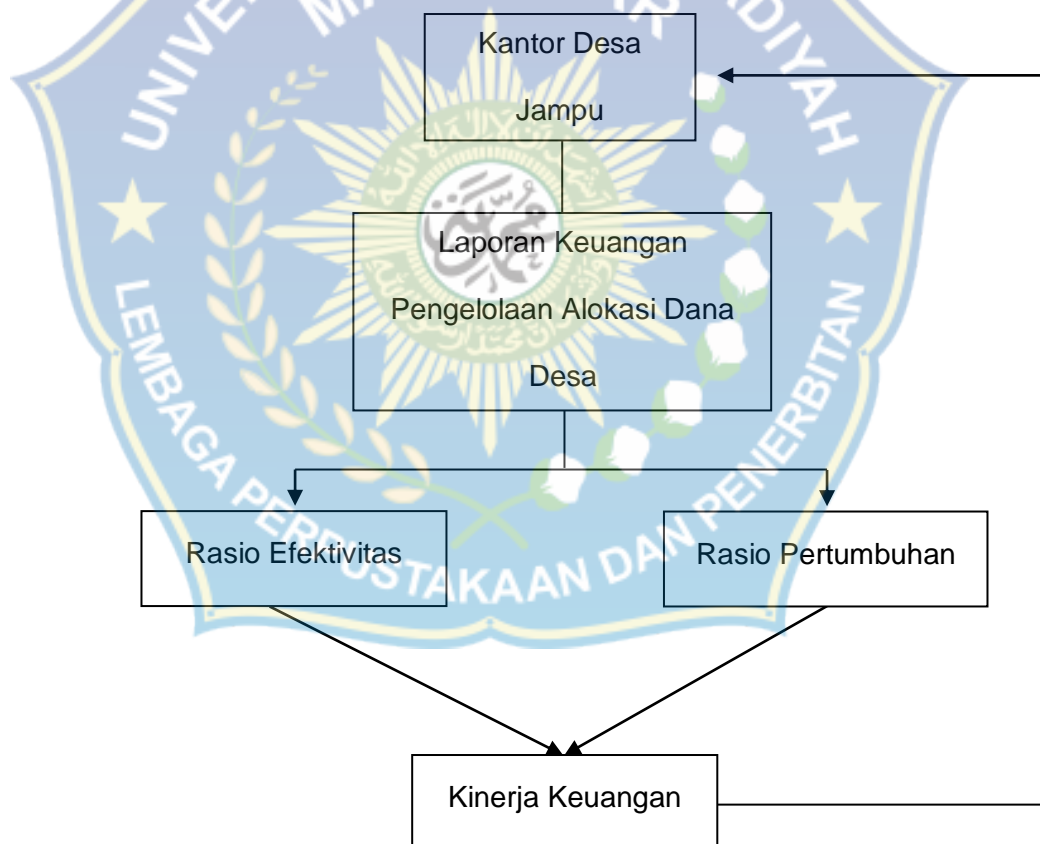
No	Nama/ Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
4	Ni Ketut Erna Rahmawati dan I Wayan Putra (2016)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010-2012	Kuantitatif dan Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Sumbawa tergolong rendah sekali, rata-rata tingkat efektivitas PAD dari tahun 2010-2012 tergolong kurang efektif, rata-rata tingkat efisiensi keuangan daerah Kabupaten Sumbawa tergolong tidak efisien, rata-rata tingkat pertumbuhan PAD menunjukkan pertumbuhan yang positif, tingkat proporsi pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa menunjukkan kontribusi terbesar untuk pendapatan daerah ditempati oleh Dana Perimbangan, sedangkan kontribusi terbesar untuk belanja daerah ditempati oleh belanja tidak langsung, dan rata-rata

No	Nama/ Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
				tingkat belanja daerah pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2010-2012 tergolong ekonomis.
5	Masita Machmud, George Kawung dan Wensy Rompas (2014)	Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012	Deskriptif	Hasil penelitian dapat digambarkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara masih menunjukkan rata-rata kinerja keuangan daerah yang masih belum stabil atau belum begitu baik. Dimana hasil perhitungan di setiap tahun masih mengalami angka yang naik turun untuk ketiga rasio yang diukur dalam pengelolaan keuangan daerah.

C. Kerangka Konsep

Analisis laporan keuangan pengelolaan alokasi dana desa perlu adanya rasio keuangan sebagai acuan dalam menganalisis kinerja keuangan. Dalam menganalisis kinerja keuangan, ada dua rasio yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan. Dengan melihat hasil rasio tersebut dapat diketahui kinerja keuangan pengelolaan alokasi dana desa kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng.

Untuk memperjelas konsep dan arah penelitian, maka peneliti membuat kerangka konsep sebagai berikut :



Gambar 2.1

Kerangka Konsep

D. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan telah dikemukakan, hipotesis yang dihadapi kantor, sebagai berikut :

“Diduga bahwa, semakin meningkat rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan, maka semakin baik kinerja keuangan pengelolaan alokasi dana desa pada Kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng”.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif karena data yang dikumpulkan dalam bentuk angka-angka dari laporan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Menurut Sugiyono (2017:8), Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan *instrument* penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Desa Jampu, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng. Alasan memilih lokasi tersebut karena merupakan daerah asal penulis sehingga memudahkan penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan selama proses penelitian. Penulis juga ingin mengetahui seberapa baik kinerja keuangan pengelolaan alokasi dana desa pada kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng.

Waktu penelitian dan penulisan dilakukan selama 2 (dua) bulan, mulai bulan Juni-Juli 2019.

C. Definisi Operasional dan Pengukuran

Definisi Operasional Kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng dan Pengukurannya, sebagai berikut :

1. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas adalah menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan Alokasi Dana Desa (ADD) yang direncanakan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan. Pengukurannya menggunakan rumus :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi ADD}}{\text{Anggaran ADD}} \times 100\%$$

2. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan adalah mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah desa dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode. Pengukurannya menggunakan rumus :

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan ADD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Pendapatan ADD } X_{n-1}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja ADD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja ADD } X_{n-1}} \times 100\%$$

3. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana pemerintah desa telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Pengukuran kinerja keuangan yaitu menganalisis hasil perhitungan dari rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2017:80) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian mengatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah laporan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2017:81) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian mengatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng tahun 2015-2018.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017:224) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian mengatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumen yaitu dengan mengcopy file laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2015-2018 dan profil kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng. Selain teknik dokumen, penulis juga menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan data-data dari sumber pustaka yang mendukung penelitian ini.

F. Teknik Analisis

Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugyono, 2017:147).

Tahap-tahap yang dilakukan dalam menganalisis data ini sebagai berikut :

- a) Menghitung rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan dari laporan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dengan membuat tabel,
- b) Membuat grafik dari hasil perhitungan rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan, dan
- c) Mendeskripsikan data dari hasil perhitungan rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan atau dengan melihat grafiknya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat

Desa Jampu berasal dari kata Jampu (Jambu) adalah sebuah pohon yang sangat strategis tempatnya untuk ditempati menikmati alam sekitar. Jauh sebelum kemerdekaan Jampu diperintah oleh seorang arung yang disebut Arung Mattampawali'E. Apabila arung Mattampawali'E mengundang dalam pelaksanaan perburuan rusa, maka tempat yang ditunjuk sebagai tempat pertemuan adalah dibawah pohon jambu karena disamping pohon itu strategis tempatnya juga batangnya besar dan daunnya rindang, bagus untuk berteduh (istirahat).

Pemerintah pertama Desa Jampu dipimpin oleh A.Abd.Karim mulai tahun 1949-1954 kemudian digantikan oleh Tike pada tahun 1954-1959 yang periode itu masih status pemerintahan Swapraja sebutan Kepala Desa disebut Kepala Wanua dan Kepala Dusun disebut Kepala Kampung. Pada tahun 1968 perubahan struktur/sistim Pemerintahan menjadi Desa. Yang menjadi Kepala Desa saat itu ialah S.A.Mulyono yang diangkat melalui pemilihan Kepala Desa dengan masa jabatan 10 (Sepuluh) tahun dan saat itu Desa Barang masih bahagian dari Desa Jampu yang wilayahnya terdiri dari 4 (Empat) Dusun yakni Dusun Barang, Dusun Jampu, Dusun Lenrang dan Dusun Lonrong.

Pada Tahun 1970 didirikanlah Kantor Desa Jampu. Pada tahun 1978 S.A.Mulyono digantikan oleh Elyas, selanjutnya terjadi pemekaran Desa. Desa Jampu dimekarkan menjadi 2 (Dua) Desa yakni pada tahun 1987

yang menjabat Kepala Desa persiapan saat itu ialah A.Sinrang (Kepala Dusun Barang) dan yang menjabat Kepala Desa Jampu ialah Elyas, pada saat itu wilayah Desa Jampu terdiri dari 3 (Tiga) Dusun sampai saat ini.

2. Visi dan Misi Kantor Desa Jampu

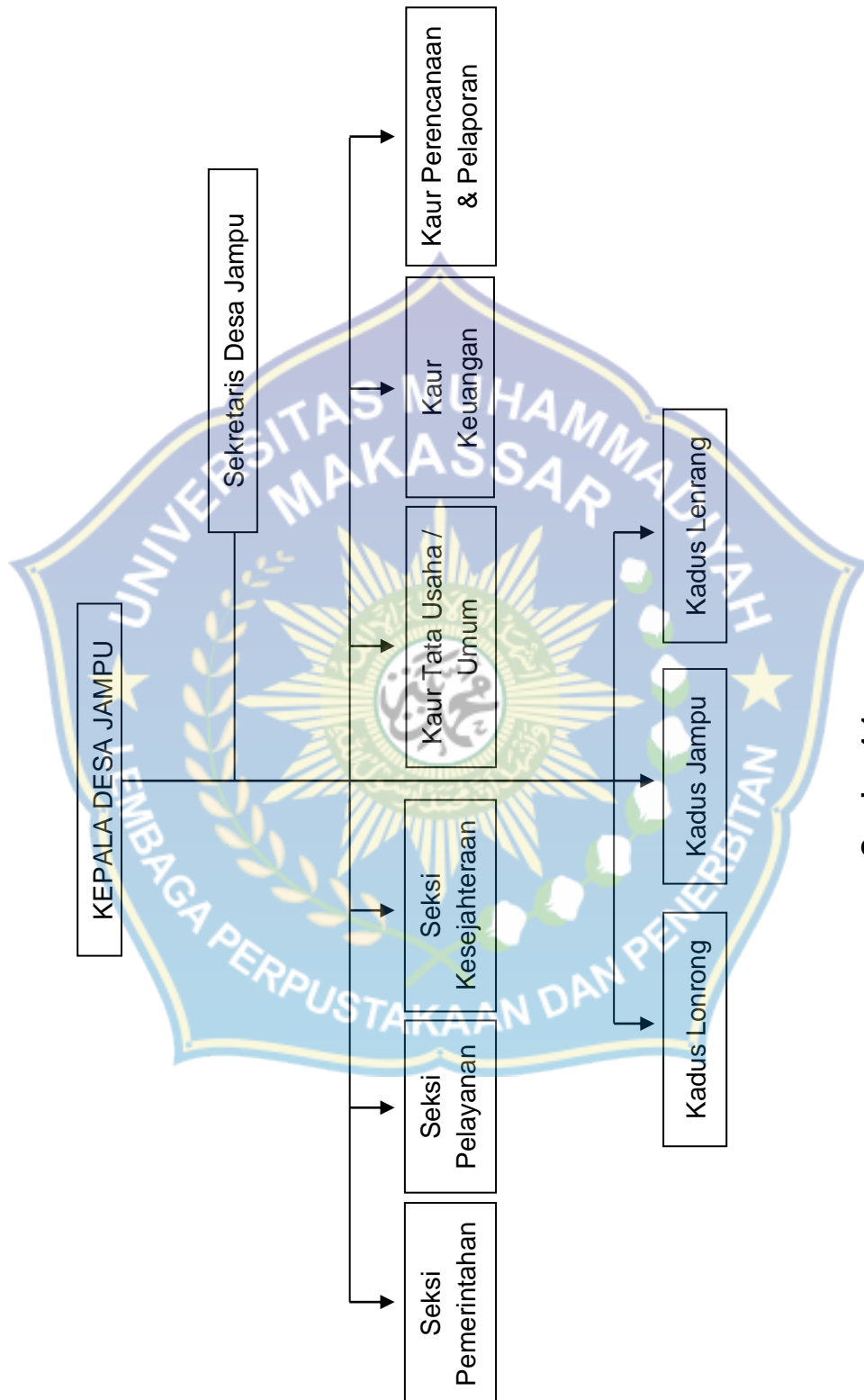
a. Visi

Melayani masyarakat Desa Jampu secara menyeluruh demi terwujudnya masyarakat Desa Jampu yang Maju, Mandiri, Sehat dan Sejahtera.

b. Misi

- 1) Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dengan komitmen melanjutkan program kegiatan pemerintah desa priode sebelumnya,
- 2) Mengoptimalkan kinerja perangkat desa secara maksimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat desa demi tercapainya pelayanan yang prima bagi masyarakat,
- 3) Melaksanakan kordinasi antara mitra kerja,
- 4) Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan memanfaatkan Sumber Daya Alam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat,
- 5) Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di desa jampu,
- 6) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat,
- 7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa jampu dengan melibatkan secara langsung dalam berbagai bentuk kegiatan,
- 8) Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik dan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,
- 9) Merencanakan sertifikasi tanah masyarakat demi menjamin kejelasan dan legilitas kepemilikan atas tanah masyarakat.

3. Struktur Organisasi



Gambar 4.1

Struktur Organisasi Kantor Desa Jampu

Sumber : Kantor Desa Jampu, 2019.

4. Uraian Tugas

a. Kepala Desa

Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a) Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah,
- b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan,
- c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan,
- d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna,
- e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana sekretaris desa mempunyai fungsi :

a) Melaksanakan urusan ketatausahaan, meliputi :

- Melaksanakan urusan tata naskah,
- Administrasi surat menyurat dan ekspedisi, dan
- Pengelolaan arsip.

b) Melaksanakan urusan umum, meliputi :

- Penataan administrasi kepala desa dan perangkat desa,
- Penyediaan prasarana kepala desa dan perangkat desa,
- Penyediaan prasarana kantor desa,
- Penyiapan rapat-rapat,
- Pengadministrasian aset dan inventarisasi,
- Penyiapan kegiatan perjalanan dinas, dan
- Pelayanan umum.

c) Melaksanakan urusan keuangan, meliputi :

- Pengurusan administrasi keuangan,
- Pengadministrasian sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,
- Verifikasi administrasi keuangan, dan
- Administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

d) Melaksanakan urusan perencanaan, meliputi :

- Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa,
- Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan,
- Melakukan *monitoring* dan evaluasi program.

c. Kepala Urusan

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, kepala urusan tersebut meliputi :

a) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi :

- Melaksanakan urusan tata naskah,
- Pengelolaan administrasi surat menyurat dan ekspedisi,
- Pengelolaan arsip desa,
- Penataan administrasi kepala desa dan perangkat desa,
- Penyediaan prasarana kepala desa dan perangkat desa,
- Penyediaan prasarana kantor,
- Penyiapan rapat-rapat,
- Pengadministrasian aset dan inventarisasi,
- Penyiapan kegiatan perjalanan dinas, dan
- Pelayanan umum.

b) Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi :

- Pengurusan administrasi keuangan,
- Pengadministrasian sumber pendapatan dan pengeluaran,
- Verifikasi administrasi keuangan, dan
- Pengadministrasian penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

c) Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi :

- Menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa),
- Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan,

- Melakukan *monitoring* dan evaluasi program, serta
- Penyusunan laporan.

d. Pelaksana teknis

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional dan berkedudukan. Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dipimpin oleh terdiri dari seksi pemerintahan, seksi pelayanan dan seksi kesejahteraan. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi :

a) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan,
- Menyusun rancangan regulasi desa,
- Pembinaan masalah pertanahan,
- Pembinaan ketentraman dan ketertiban,
- Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat,
- Pengelolaan administrasi kependudukan,
- Penataan dan pengelolaan wilayah, serta
- Pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

b) Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi :

- Melaksanakan penyuluhan, motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat,
- Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, dan
- Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

c) Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi :

- Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan,
- Pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan

- Sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

e. Pelaksana Kewilayahan

Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh kepala dusun.

Kepala dusun bertugas membantu kepala desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala dusun memiliki fungsi :

- a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban,
- b) Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat,
- c) Pembinaan mobilitas kependudukan,
- d) Penataan dan pengelolaan wilayah,
- e) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya,
- f) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya, dan
- g) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

B. Hasil Penelitian

Analisis kinerja keuangan kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan dalam bidang keuangan. Rasio yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis kinerja keuangan kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng yaitu rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan.

Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah laporan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Dari data tersebut nantinya dapat memberikan gambaran informasi mengenai kinerja keuangan kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng selama kurun waktu 4 tahun terakhir (tahun 2015-2018). Adapun hasil dari analisis rasio tersebut sebagai berikut :

1. Rasio Efektivitas

Kinerja pemerintah Desa Jampu kabupaten Soppeng dikatakan efektif apabila rasio yang dihasilkan atau dicapai adalah 90-100%. Apabila anggaran yang disediakan hampir sama dengan yang di realisasikan dapat membuktikan bahwa kinerja keuangan pada suatu desa berjalan dengan baik. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah desa.

Rasio efektivitas dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi ADD}}{\text{Anggaran ADD}} \times 100\%$$

Laporan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng sebagai berikut :

Tabel 4.1
Laporan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada kantor Desa
Jampu Kabupaten Soppeng

Tahun	Realisasi ADD (Rp)	Anggaran ADD (Rp)
2015	438.652.506	445.908.193
2016	1.333.773.288	1.417.880.281
2017	757.321.168	1.303.099.483
2018	941.430.058	1.214.429.116

Sumber : APBDesa Jampu Kabupaten Soppeng (Data diolah, 2019)

Perhitungan Rasio Efektivitas kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2015-2018, sebagai berikut :

$$\text{Tahun 2015} = \frac{\text{Rp. 438.652.506}}{\text{Rp. 445.908.193}} \times 100\% = 98,37\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{\text{Rp. 1.333.773.288}}{\text{Rp. 1.417.880.281}} \times 100\% = 94,06\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{\text{Rp. 757.321.168}}{\text{Rp. 1.303.099.483}} \times 100\% = 58,11\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{\text{Rp. 941.430.058}}{\text{Rp. 1.214.429.116}} \times 100\% = 77,52\%$$

Tabel 4.2
Rasio Efektivitas Kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng

Tahun	Realisasi ADD (Rp)	Anggaran ADD (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2015	438.652.506	445.908.193	98,37%	Efektif
2016	1.333.773.288	1.417.880.281	94,06%	Efektif
2017	757.321.168	1.303.099.483	58,11%	Tidak Efektif
2018	941.430.058	1.214.429.116	77,52%	Kurang Efektif

Sumber : APBDesa Jampu Kabupaten Soppeng (Data diolah, 2019)

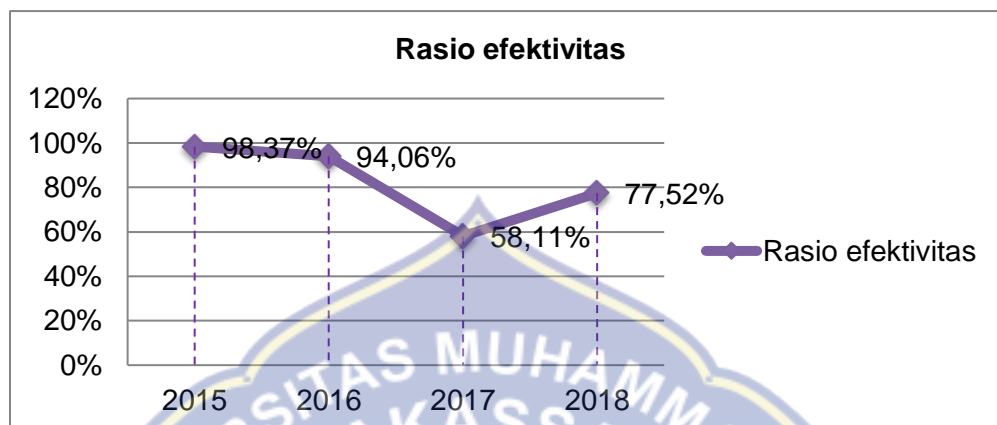
Kinerja keuangan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) apabila sudah Efektif berdampak baik pada pengembangan infrastruktur dan non infrastruktur dalam suatu desa.

Dampak dari Tidak Efektifnya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang terealisasi dapat membuat suatu desa tidak mengalami perkembangan atau bahkan mengalami penurunan sehingga desa tersebut akan mengalami keterpurukan.

Apabila pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kurang Efektif dapat berdampak pada kurangnya pengembangan infrastruktur dan non infrastruktur dalam suatu desa sehingga akan menghambat kemajuan desa tersebut.

Gambar 4.2

Rasio Efektivitas Kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng



Sumber : Dari tabel 4.2 (Diolah kembali, 2019)

2. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah desa dalam tahun anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Kinerja pemerintah Desa Jampu kabupaten Soppeng dikatakan baik, jika setiap tahunnya pertumbuhan pendapatan atau belanja yang dihasilkan bernilai positif.

Rasio pertumbuhan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Rasio Pertumbuhan Pendapatan ADD

$$= \frac{\text{Realisasi Pendapatan ADD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Pendapatan ADD } X_{n-1}} \times 100\%$$

Rasio Pertumbuhan Belanja ADD

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja ADD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja ADD } X_{n-1}} \times 100\%$$

Laporan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng sebagai berikut :

Tabel 4.3
Laporan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada kantor Desa
Jampu Kabupaten Soppeng

Tahun	Realisasi Pendapatan ADD (Rp)	Realisasi Belanja ADD (Rp)
2015	445.908.193	438.652.506
2016	1.417.880.281	1.333.773.288
2017	1.303.099.483	757.321.168
2018	1.214.429.116	941.430.058

Sumber : APBDesa Jampu Kabupaten Soppeng (Data diolah, 2019)

Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan ADD kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2015-2018, sebagai berikut :

$$\text{Tahun 2015} = \frac{\text{Rp. 445.908.193} - \text{Rp. 0}}{\text{Rp. 0}} \times 100\% = -$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{\text{Rp. 1.417.880.281} - \text{Rp. 445.908.193}}{\text{Rp. 445.908.193}} \times 100\% = 217,97\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{\text{Rp. 1.303.099.483} - \text{Rp. 1.417.880.281}}{\text{Rp. 1.417.880.281}} \times 100\% = -8,09\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{\text{Rp. 1.214.429.116} - \text{Rp. 1.303.099.483}}{\text{Rp. 1.303.099.483}} \times 100\% = -6,80\%$$

Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja ADD kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2015-2019, sebagai berikut :

$$\text{Tahun 2015} = \frac{\text{Rp. 438.652.506} - \text{Rp. 0}}{\text{Rp. 0}} \times 100\% = -$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{\text{Rp.1.333.773.288} - \text{Rp. 438.652.506}}{\text{Rp. 438.652.506}} \times 100\% = 204,06\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{\text{Rp.757.321.168} - \text{Rp. 1.333.773.288}}{\text{Rp. 1.333.773.288}} \times 100\% = -43,21\%$$

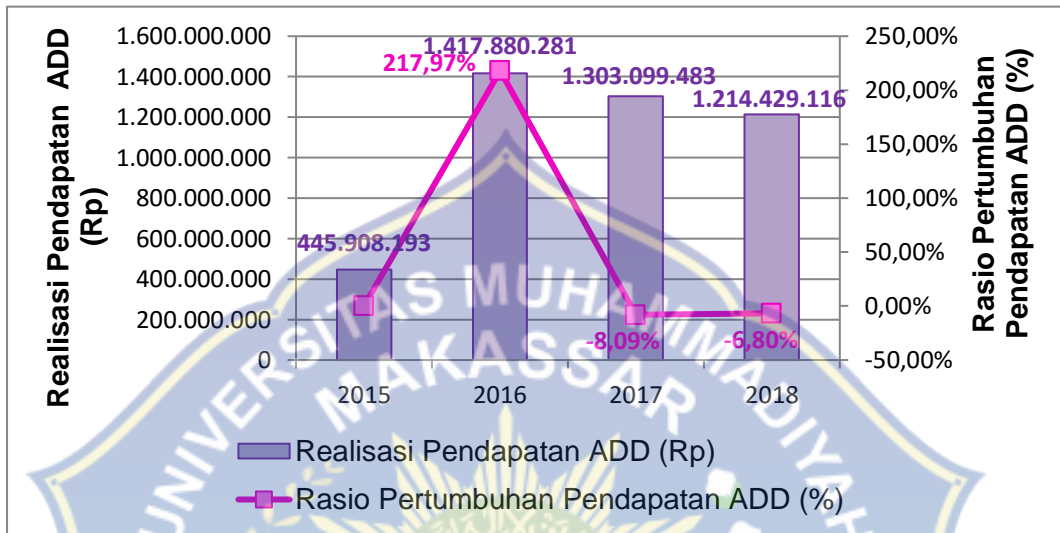
$$\text{Tahun 2018} = \frac{\text{Rp.941.430.058} - \text{Rp. 757.321.168}}{\text{Rp. 757.321.168}} \times 100\% = 24,31\%$$

Tabel 4.4
Rasio Pertumbuhan Kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng

Tahun	Realisasi Pendapatan ADD (Rp)	Rasio Pertumbuhan Pendapatan ADD (%)	Realisasi Belanja ADD (Rp)	Rasio Pertumbuhan Belanja ADD (%)
2015	445.908.193	—	438.652.506	—
2016	1.417.880.281	217,97%	1.333.773.288	204,06%
2017	1.303.099.483	-8,09%	757.321.168	-43,21%
2018	1.214.429.116	-6,80%	941.430.058	24,31%

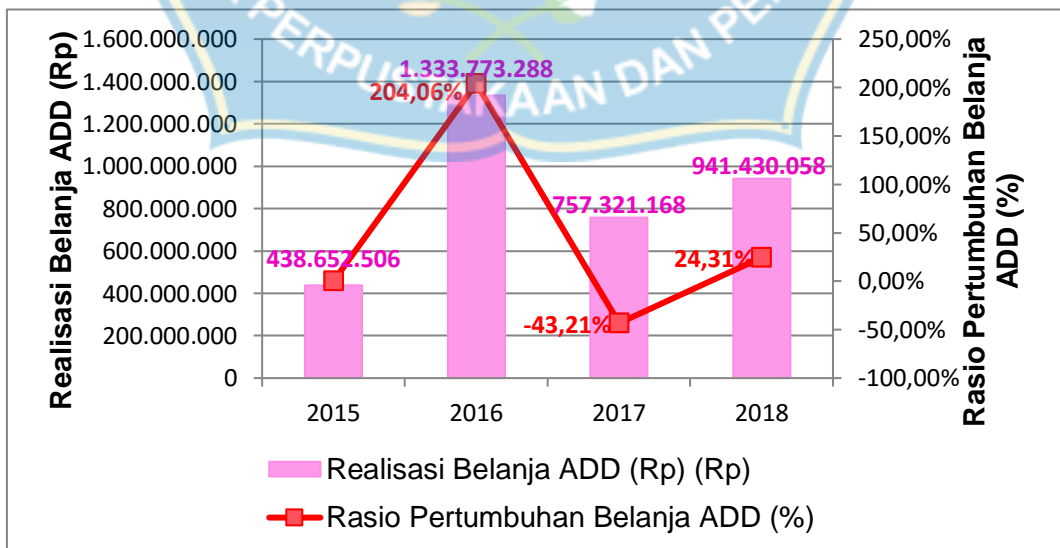
Sumber : APBDesa Jampu Kabupaten Soppeng (Data diolah, 2019)

Gambar 4.3
Rasio Pertumbuhan Pendapatan ADD Kantor Desa Jampu
Kabupaten Soppeng



Sumber : Dari tabel 4.4 (Diolah kembali, 2019)

Gambar 4.4
Rasio Pertumbuhan Belanja ADD Kantor Desa Jampu
Kabupaten Soppeng



Sumber : Dari tabel 4.4 (Diolah kembali, 2019)

C. Pembahasan

1. Rasio Efektivitas

Laporan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng menunjukkan bahwa anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2015-2018. Pada tahun 2015 Alokasi Dana Desa (ADD) dianggarkan sebesar Rp. 445.908.193. Pada tahun 2016 Alokasi Dana Desa (ADD) naik menjadi Rp. 1.417.880.281. Kemudian pada tahun 2017 anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) diturunkan menjadi Rp. 1.303.099.483. Pada 2018 anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) kembali diturunkan menjadi Rp. 1.214.429.116.

Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng dari tahun 2015-2018 mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2015 Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 438.652.506. Pada tahun 2016 Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) mengalami kenaikan menjadi Rp. 1.333.773.288. Mengalami penurunan pada tahun 2017 yaitu menjadi Rp. 757.321.168. Kemudian pada tahun 2018 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp. 941.430.058.

Berdasarkan perhitungan dari Rasio Efektivitas dapat diketahui bahwa Rasio Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) keuangan kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng pada tahun 2015 sebesar 98,37%, tahun 2016 sebesar 94,06%, tahun 2017 sebesar 58,11%, dan tahun 2018 sebesar 77,52%. Efektivitas kinerja keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng untuk tahun 2015 dan 2016 dikategorikan Efektif walaupun terjadi penurunan di tahun 2016 sebesar 4,31% tetapi masih berada pada tingkat rasio 90%. Untuk tahun

2017 berjalan Tidak Efektif karena nilai yang diperoleh di bawah 60%. Kemudian tahun 2018 berjalan Kurang Efektif karena nilai yang diperoleh di atas 70%.

Menurut uraian dan hasil perhitungan pada Rasio Efektivitas, Kinerja Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng Cukup Efektif karena rata-rata efektivitasnya di atas 80% yaitu 82,015%.

Penurunan rasio efektivitas dari tahun 2015-2018 terjadi disebabkan karena jumlah anggaran yang besar berbanding terbalik dengan jumlah anggaran yang terealisasi. Dengan menurunnya rasio ini juga menunjukkan Pemerintah Desa Jampu Kabupaten Soppeng dapat dikatakan memiliki kinerja yang Cukup Efektif dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD).

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng tergolong Baik dalam merealisasikan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah direncanakan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rigel Nurul Fathah (2017) yang melakukan penelitian di Daerah Kabupaten Gunung Kidul dijelaskan bahwa Kinerja Keuangan daerah Kabupaten Gunung Kidul jika dilihat dari Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tergolong Efektif, karena rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu 131,8%. Berbeda dengan yang terjadi dalam penelitian ini, Kinerja Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng Cukup Efektif karena rata-rata efektivitasnya di atas 80% yaitu 82,015%. Pemerintah Desa Jampu Kabupaten Soppeng perlu meniru kinerja yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul.

2. Rasio Pertumbuhan

Laporan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng menunjukkan bahwa Realisasi Pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD) mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2015-2018. Pada tahun 2015 Realisasi Pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 445.908.193, naik menjadi Rp. 1.417.880.281 pada tahun 2016. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi Rp. 1.303.099.483. Mengalami kembali penurunan pada tahun 2018 menjadi Rp. 1.214.429.116.

Berdasarkan perhitungan dari Rasio Pertumbuhan dapat diketahui bahwa Rasio Pertumbuhan Pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD) keuangan kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng pada tahun 2016 sebesar 217,97%, mengalami penurunan dari tahun 2017 yaitu (8,09%), dan tahun 2018 kembali mengalami penurunan yaitu (6,80%).

Dari tabel 4.4 terlihat bahwa Pertumbuhan Pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD) kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng menunjukkan pertumbuhan yang positif dan negatif. Pertumbuhan Pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD) yang tertinggi ada pada tahun 2016 yaitu sebesar 217,97% dan mengalami penurunan pertumbuhan di tahun 2017 sebesar (8,09%).

Laporan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng menunjukkan bahwa Realisasi Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2015-2018. Pada tahun 2015 Realisasi Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 438.652.506, naik menjadi Rp. 1.333.773.288 pada tahun 2016. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi

Rp. 757.321.168. Pada tahun 2018 naik menjadi Rp. 941.430.058.

Berdasarkan perhitungan dari Rasio Pertumbuhan dapat diketahui bahwa Rasio Pertumbuhan Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) keuangan kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng pada tahun 2016 sebesar 204,06%, mengalami penurunan pada tahun 2017 yaitu (43,21%), dan tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 24,31%.

Dari tabel 4.4 terlihat bahwa Pertumbuhan Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng menunjukkan pertumbuhan yang positif dan negatif. Puncak pertumbuhan berada pada tahun 2016 yaitu sebesar 204,06%, sementara itu terjadi penurunan pertumbuhan di tahun 2017 yaitu sebesar (43,21%).

Menurut uraian dan hasil perhitungan pada Rasio Pertumbuhan Pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD), Kinerja Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng tumbuh secara positif dari tahun 2015-2018 karena rata-rata Pertumbuhannya sebesar 67,69%. Hasil perhitungan pada Rasio Pertumbuhan Belanja Alokasi Dana Desa (ADD), Kinerja Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng juga mengalami pertumbuhan secara positif dari tahun 2015-2018 sebesar 61,72%.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Arthaingan H.Mutiha (2016) yang melakukan penelitian di Daerah Kota Bogor memiliki kinerja pengelolaan keuangan daerah yang baik terbukti dari rasio pertumbuhan yang positif setiap tahunnya. Berbeda dengan penelitian ini yang menunjukkan pertumbuhan positif dan negatif. Pemerintah Desa Jampu Kabupaten Soppeng perlu meniru kinerja yang telah dicapai oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng dari tahun 2015-2018 sudah Baik. Hal itu dapat dilihat dari hasil perhitungan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan sebagai berikut :

1. Kinerja Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng jika dilihat dari Rasio Efektivitas dikategorikan Cukup Efektif, karena rata-rata efektivitasnya dari tahun 2015-2018 di atas 80% yaitu 82,015%. Rinciannya adalah sebagai berikut : tahun 2015 sebesar 98,37%, tahun 2016 sebesar 94,06%, tahun 2017 sebesar 58,11%, dan tahun 2018 sebesar 77,52%.

Kinerja Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan tumbuh secara positif. Rata-rata Rasio Pertumbuhan Pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD) dari tahun 2015-2018 sebesar 67,69% lebih bagus bila dibandingkan dengan Rasio Pertumbuhan Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) yang hanya sebesar 61,72%. Rincian Rasio Pertumbuhan Pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut : tahun 2016 sebesar 217,97%, tahun 2017 sebesar (8,09%), dan tahun 2018 sebesar (6,80%). Rincian Rasio Pertumbuhan Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut : tahun 2016 sebesar 204,06%, tahun 2017 sebesar (43,21%), dan tahun 2018 sebesar 24,31%.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Desa Jampu Kabupaten Soppeng

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ditingkatkan lebih lanjut dan Pemerintah Desa Jampu Kabupaten Soppeng diharapkan dapat mengefektifkan dana yang ada supaya bisa dirasakan masyarakat secara berkelanjutan sehingga desa mempunyai sumber dana sendiri.

Pemerintah Desa Jampu Kabupaten Soppeng harus terus meningkatkan dan mengoptimalkan Pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD) dari tahun ke tahun dan diharapkan Pemerintah Desa juga perlu meningkatkan realisasi Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga dapat melaksanakan otonomi desa yang lebih baik.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sama diharapkan menggunakan lebih banyak rasio lagi sehingga hasil penelitiannya bisa lebih andal dan akurat. Selain itu juga penelitian ini hanya dilakukan pada salah satu kantor Desa di Kabupaten Soppeng yaitu kantor Desa Jampu. Diharapkan peneliti selanjutnya melakukan penelitian di lingkup yang lebih luas dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliansa, Riska. 2017. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* [skripsi]. Surakarta (ID): Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Athoillah, Anton. 2013. *Dasar-Dasar Manajemen*. CV Pustaka Setia: Bandung.
- Fahmi, Irham. 2014. *Manajemen Teori, Kasus dan Solusi*. Alfabeta, cv: Bandung.
- Fathah, Rigel Nurul. 2017. Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal EBBANK*. Vol.8 No.1.
- Halim, Abdul. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Empat. Salemba Empat: Jakarta.
- Hery. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. PT Bumi Aksara: Jakarta.
- Jumingan. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. PT Bumi Aksara: Jakarta.
- Kasmir. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- _____. 2013. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Kencana: Jakarta.
- Lili, Marselina Ara. 2018. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar. *Artikel Ilmiah*. ([16187-32454-1-SM.pdf](#), diakses tanggal 22 Maret 2019).
- Machmud, Masita., George Kawung dan Wensy Rompas. 2014. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol.14 No.2.
- Mahsun, Mohammad. 2016. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPF: Yogyakarta.
- Musthafa. 2017. *Manajemen Keuangan*. ANDI : Yogyakarta.
- Mutiha, Arthaingan H. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010-2014. *Jurnal Vokasi Indonesia*. Vol.4 No.2.
- Nurhayati. 2015. Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*. Vol.4 No.1.
- Rahmawati, Ni Ketut Erna dan I Wayan Putra. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010-2012. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.15 No.3.

Ropa, Mega Oktavia. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*. Vol.4 No.2.

Sugiono, Arief. 2009. *Manajemen Keuangan untuk Praktisi Keuangan*. PT Grasindo, anggota Ikapi: Jakarta.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta, cv: Bandung.

Sujarweni, V. Wiratna. 2017. *Analisis Laporan Keuangan Teori, Aplikasi dan Hasil Penelitian*. Pustaka Baru Press: Yogyakarta.

_____. 2017. *Manajemen Keuangan Teori, Aplikasi dan Hasil Penelitian*. Pustaka Baru Press: Yogyakarta.

Wonda, Welio. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Masa Otonomi Daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua. *Jurnal EMBA*. Vol.4 No.3.



L

A

M

P

I

R

A

N



Lampiran 1
Surat Permohonan Izin Penelitian


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

1 2 0 1 9 1 9 1 4 2 6 5 4 1

Nomor : 16313/S.01/PTSP/2019
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Soppeng

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1515/05/C.4-VIII/V/1440/2019 tanggal 17 Mei 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : YAYU SRI EVA
Nomor Pokok : 105720535415
Program Studi : Manajemen
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah, dengan judul :

" ANALISIS KINERJA KEUANGAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA BERDASARKAN RASIO EFEKTIVITAS DAN RASIO PERTUMBUHAN PADA KANTOR DESA JAMPU KABUPATEN SOPPENG "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **18 Mei s/d 18 Juli 2019**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 17 Mei 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu


A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

SIMAP PTSP 20-05-2019

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90222





SRN CO0003237

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Salotungo No. 2 Tlp. 0484 - 23743 Watansoppeng 90812

IZIN PENELITIAN

Nomor : 165/IP/DPM-PTSP/V/2019

DASAR 1. Surat Permohonan **YAYU SRI EVA** Tanggal **27-05-2019**
2. Rekomendasi dari **BAPPELITBANGDA**
Nomor **172/IP/REK-T.TEKNIS/BAP/V/2019** Tanggal **29-05-2019**

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **YAYU SRI EVA**
UNIVERSITAS/ : **UNIVERSITAS MUHAMMADIAH MAKASSAR**
LEMBAGA
Jurusan : **MANAJEMEN**
ALAMAT : **JAMPU DESA JAMPU KEC. LILIRIAJA**
UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Soppeng dengan keterangan sebagai berikut :
JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS KINERJA KEUANGAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA BERDASARKAN RASIO EFEKTIVITAS DAN RASIO PERTUMBUHAN PADA KANTOR DESA JAMPU KABUPATEN SOPPENG**
LOKASI PENELITIAN : **KANTOR DESA JAMPU**
JENIS PENELITIAN : **KUANTITATIF**
LAMA PENELITIAN : **18 Mei 2019 s.d 18 Juli 2019**
a. Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : 29-05-2019

an. BUPATI SOPPENG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SOPPENG



FIRMAN SP, MM

Pangkat : **PEMBINA TK. I**

NIP : **19621012 198603 1 027**

Biaya : Rp. 0,00

Lampiran 2
Surat Rekomendasi Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN LILIRIAJA
DESA JAMPU

Alamat : Jln. Andi Abdul Muis No. 26 Jampu Kode Pos. 90861

Jampu, 14 Juni 2019

Kepada
Yth, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar
di –
Makassar

Nomor : 80/D.Jam/VI/2019
Lampiran : -
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Berdasarkan surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Nomor : 165/IP/DPM-PTSP/V/2019, perihal Izin Penelitian sebagai berikut :

Nama : YAYU SRI EVA
NIM : 105720535415
Program Studi : Manajemen
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Universitas : Universitas Muhammadiyah Makassar
Judul Penelitian: Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana
Desa berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan
pada Kantor Desa Jampu

Sehubungan dengan hal diatas maka Kepala Desa Jampu memberikan
Izin/Rekomendasi kepada mahasiswi tersebut untuk meneliti di Kantor Desa Jampu.

Demikian Izin/Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

KEPALA DESA JAMPU

NURHAFSAH S. Sos, MM

Lampiran 3
Surat Keterangan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN LILIRIAJA
DESA JAMPU

Alamat : Jln. Andi Abdul Muis No. 26 Jampu Kode Pos. 90861

SURAT KETERANGAN

Nomor : 87/D.Jam/VI/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Jampu Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, menerangkan bahwa :

Nama : YAYU SRI EVA
NIM : 105720535415
Program Studi : Manajemen
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Universitas : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah melakukan penelitian pada kantor Desa Jampu mulai tanggal 14 Juni s/d 25 Juni 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Jampu, 26 Juni 2019

KEPALA DESA JAMPU


NURHAFSAH, S.Sos, MM

LAMPIRAN 4
LAPORAN APBDesa 2015

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JAMPU
TAHUN ANGGARAN 2015

KODE REK	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)	JUMLAH REALISASI (RP)	LEBIH / KURANG (RP)	KET
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
1.1	Pendapatan Asli Desa	120.000.000			
1.1.2	Swadaya Partisipasi dan Gotong royong	120.000.000			
1.2	Pendapatan Transfer	743.777.749			
1.2.1	Dana Desa	297.869.556	297.869.556		
1.2.3	Alokasi Dana Desa	267.991.993	267.991.993		
1.2.4	Bantuan Keuangan	177.916.200	177.916.200		
	JUMLAH PENDAPATAN	863.777.749	743.777.749		

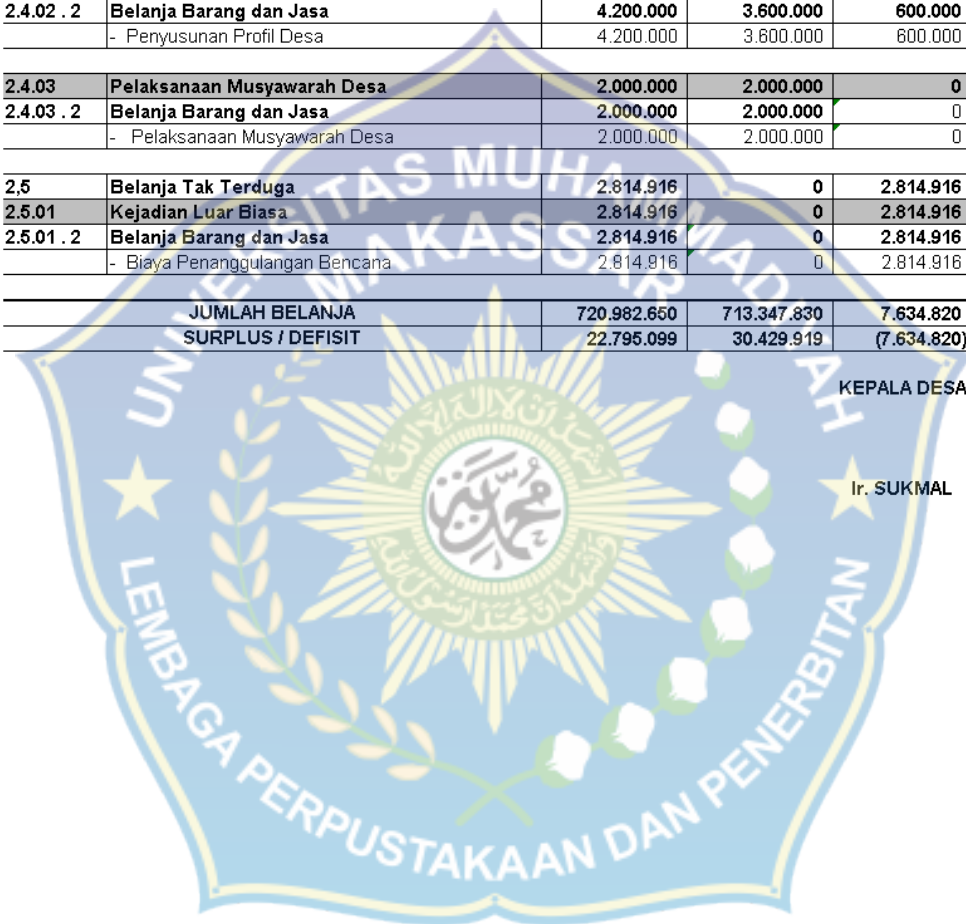
KODE REK	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)	JUMLAH REALISASI (RP)	LEBIH / KURANG (RP)	KET
1	2	3	4	5	6
2	BELANJA				
2.1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	258.313.798	254.726.093	3.587.705	
2.1.01	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	177.916.200	177.916.200	0	ADD
2.1.01.1	Belanja Pegawai	177.916.200	177.916.200	0	
	- Tunjangan Kepala Desa	25.125.000	25.125.000	0	
	- Tunjangan Sekretaris Desa	4.800.000	4.800.000	0	
	- Tunjangan Kaur Keuangan	12.096.000	12.096.000	0	
	- Tunjangan Kaur Umum	12.096.000	12.096.000	0	
	- Tunjangan Kaur Perencanaan	12.096.000	12.096.000	0	
	- Tunjangan Kasi Pemerintahan	12.096.000	12.096.000	0	
	- Tunjangan Kasi Pembangunan	12.096.000	12.096.000	0	
	- Tunjangan Kasi Ekokesra	12.096.000	12.096.000	0	
	- Tunjangan Bendahara Desa	5.227.200	5.227.200	0	
	- Tunjangan Kadus Lonrong	12.096.000	12.096.000	0	
	- Tunjangan Kadus Jampu	12.096.000	12.096.000	0	
	- Tunjangan Kadus Lenrang	12.096.000	12.096.000	0	
	- Tunjangan Ketua BPD	6.300.000	6.300.000	0	
	- Tunjangan Wakil Ketua BPD	4.950.000	4.950.000	0	
	- Tunjangan Sekretaris BPD	4.650.000	4.650.000	0	
	- Tunjangan Anggota BPD I	4.500.000	4.500.000	0	
	- Tunjangan Anggota BPD II	4.500.000	4.500.000	0	
	- Tunjangan Anggota BPD III	4.500.000	4.500.000	0	
	- Tunjangan Anggota BPD IV	4.500.000	4.500.000	0	
2.1.02	Operasional Perkantoran	75.997.598	73.984.893	2.012.705	ADD
2.1.02.2	Belanja Barang dan Jasa	50.097.598	48.064.893	2.012.705	
	- Biaya ATK	5.000.000	5.000.000	0	
	- Biaya Benda Pos	510.000	510.000	0	
	- Biaya Cetak dan Penggandaan	3.100.000	3.100.000	0	
	- Biaya Makan Minum Harian	3.500.000	3.500.000	0	
	- Biaya Makan Minum Rapat	3.337.000	3.332.250	4.750	
	- Biaya Makan Minum Tamu	2.000.998	2.000.000	998	
	- Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000	8.000.000	0	
	- Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.600.000	2.600.000	0	
	- Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	1.615.000	1.614.500	500	
	- Biaya Listrik	2.000.000	1.648.652	351.348	
	- Biaya Telepon	2.400.000	2.397.000	3.000	
	- Biaya Jasa Cleaning Service	1.210.000	1.200.000	10.000	
	- Biaya Pengadaan Pakaian Dinas	5.619.600	5.577.491	42.109	
	- Pengadaan Printer	720.000	720.000	0	
	- Pengadaan Infus Catridge	135.000	135.000	0	
	- Pengadaan Surat Kabar dan Majalah	1.400.000	1.400.000	0	
	- Honor Tim Perumusan RPJMDesa dan RKP	2.250.000	2.250.000	0	
	- Honor Panitia APBDesa	2.200.000	1.300.000	900.000	
	- Honor Penyusunan APBDesa	2.000.000	1.300.000	700.000	
	- Honor LPPD	500.000	500.000	0	

2.1.02 . 3	Belanja Modal	25.900.000	25.900.000	0	
	- Pengadaan Kursi Tamu	5.800.000	5.800.000	0	
	- Pengadaan Laptop	7.400.000	7.400.000	0	
	- Pengadaan Kamera	4.050.000	4.050.000	0	
	- Pengadaan AC	4.800.000	4.800.000	0	
	- Biaya Software APBDesa	3.850.000	3.850.000	0	
2.1.03	Operasioal BPD	4.400.000	2.825.000	1.575.000	ADD
2.1.03 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000	2.825.000	1.575.000	
	- Biaya ATK	800.000	800.000	0	
	- Biaya Cetak dan Pengadaan	700.000	700.000	0	
	- Biaya Makan Minum Rapat	1.200.000	1.200.000	0	
	- Biaya Perjalanan Dinas	1.700.000	125.000	1.575.000	
2.2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	439.867.778	439.531.737	336.041	
2.2.04	Pengadaan Kursi Rapat	7.006.552	7.005.000	1.552	ADD
2.2.04 . 3	Belanja Modal	7.006.552	7.005.000	1.552	
	- Pengadaan Kursi Rapat	7.006.552	7.005.000	1.552	
2.2.05	Pengadaan LCD Proyektor	8.001.000	8.000.000	1.000	ADD
2.2.05 . 3	Belanja Modal	8.001.000	8.000.000	1.000	
	- Belanja LCD Proyektor	8.001.000	8.000.000	1.000	
2.2.11	Pembangunan Dam, Irigasi, Bendungan	417.860.226	417.526.737	333.489	
2.2.11 . 2	Belanja Barang dan Jasa	201.774.081	201.581.737	192.344	
	- Honor Konsultan Pembangunan Drainase Dusun Lenrang	1.500.775	1.500.775	0	ADD
	- Honor Tim Pembangunan Drainase Dusun Lenrang	2.251.113	2.251.000	113	ADD
	- Biaya Makan Minum Pembangun Drainase Dusun Lenrang	2.251.113	2.250.000	1.113	ADD
	- Transport Tim Pembangunan Drainase Dusun Lenrang	1.500.775	1.496.000	4.775	ADD
	- Upah Pembangunan Drainase Dusun Lenrang	26.654.738	26.653.000	1.738	ADD
	- Honor Konsultan Pembangun Talud Aggattungeng	1.200.604	1.200.604	0	ADD
	- Honor Tim Pembangunan Talud Aggattungeng	1.800.906	1.800.906	0	ADD
	- Biaya Makan Minum Pembangun Talud Aggattungeng	1.800.906	1.800.000	906	ADD
	- Transport Tim Pembangunan Talud Aggattungeng	1.200.604	1.200.000	604	ADD
	- Upah Pembangunan Talud Aggattungeng	16.719.197	16.676.000	43.197	ADD
	- Honor Konsultan Pembangun Talud Sumur Uloe	300.151	300.151	0	ADD
	- Honor Tim Pembangunan Talud Sumur Uloe	450.227	450.227	0	ADD
	- Biaya Makan Minum Pembangun Talud Sumur Uloe	450.227	450.000	227	ADD
	- Transport Tim Pembangunan Talud Sumur Uloe	300.151	296.000	4.151	ADD
	- Upah Pembangunan Talud Sumur Uloe	8.290.216	8.173.000	117.216	ADD
	- Honor Konsultan Pembangun Drainase Palla'e	5.302.074	5.302.074	0	
	- Honor Tim Pembangunan Drainase Palla'e	7.953.115	7.953.000	115	
	- Biaya Makan Minum Pembangun Drainase Palla'e	7.953.115	7.952.000	1.115	
	- Transport Tim Pembangunan Drainase Palla'e	5.302.074	5.296.000	6.074	
	- Upah Pembangunan Drainase Palla'e	108.592.000	108.581.000	11.000	
2.2.11 . 03	Belanja Modal	216.086.145	215.945.000	141.145	
	- Biaya Material Bahan Bangunan Drainase Dusun Lenrang	31.743.712	31.720.000	23.712	ADD
	- Biaya Material Bahan Bangunan Pembangunan Talud Aggattungeng	34.181.385	34.136.250	45.135	ADD
	- Biaya Material Bahan Bangunan Pembangunan Talud Sumur Ule	17.478.705	17.477.500	1.205	ADD
	- Biaya Material Bahan Bangunan Pembangunan Drainase Palla'e	132.682.343	132.611.250	71.093	
2.2.23	Pembangunan lain-lain	7.000.000	7.000.000	0	
2.2.23 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000	7.000.000	0	
	- Biaya Perbaikan Plafon Kantor Desa	7.000.000	7.000.000	0	

2,3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	10.192.636	10.190.000	2.636	
2.3.09	Bantuan Keuangan Kegiatan Lembaga Kemasyar	10.192.636	10.190.000	2.636	ADD
2.3.09 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.192.636	10.190.000	2.636	
	- Bantuan Keuangan PKK	4.192.636	4.190.000	2.636	
	- Bantuan Keuangan Majelis Taklim	2.000.000	2.000.000	0	
	- Bantuan Keuangan Imam Desa	2.000.000	2.000.000	0	
	- Bantuan Keuangan Karang Taruna	2.000.000	2.000.000	0	
2,4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	9.503.786	8.900.000	603.786	
2.4.01	Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	3.303.786	3.300.000	3.786	ADD
2.4.01 . 1	Belanja Pegawai	3.303.786	3.300.000	3.786	
	- Biaya Pelatihan Kepala Desa	3.303.786	3.300.000	3.786	
2.4.02	Penyusunan Profil Desa	4.200.000	3.600.000	600.000	ADD
2.4.02 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000	3.600.000	600.000	
	- Penyusunan Profil Desa	4.200.000	3.600.000	600.000	
2.4.03	Pelaksanaan Musyawarah Desa	2.000.000	2.000.000	0	ADD
2.4.03 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	2.000.000	0	
	- Pelaksanaan Musyawarah Desa	2.000.000	2.000.000	0	
2,5	Belanja Tak Terduga	2.814.916	0	2.814.916	
2.5.01	Kejadian Luar Biasa	2.814.916	0	2.814.916	
2.5.01 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.814.916	0	2.814.916	
	- Biaya Penanggulangan Bencana	2.814.916	0	2.814.916	
JUMLAH BELANJA		720.982.650	713.347.830	7.634.820	
SURPLUS / DEFISIT		22.795.099	30.429.919	(7.634.820)	

KEPALA DESA

Ir. SUKMAL



LAMPIRAN 5
LAPORAN APBDesa 2016

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JAMPU
TAHUN ANGGARAN 2016

KODE REK	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	LEBIH / KURANG (Rp)	KET
1	2	3	4	5	
1	PENDAPATAN				
1.2	Pendapatan Transfer	2.084.701.281	2.084.701.281	0	
1.2.1	Dana Desa	666.821.000	666.821.000	0	
1.2.3	Alokasi Dana Desa	971.900.281	971.900.281	0	
1.2.4	Bantuan Keuangan	445.980.000	445.980.000	0	
1.3	Pendapatan lain-lain	300.000	1.826.688	-1.526.688	
1.3.3	Pendapatan Bunga Bank	300.000	1.826.688	-1.526.688	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.085.001.281	2.086.527.969	-1.526.688	
KODE REK	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	LEBIH / KURANG (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
2	BELANJA				
2.1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	706.375.820	650.569.068	55.806.752	
2.1.01	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	367.860.000	367.860.000	0	ADD
2.1.01.1	Belanja Pegawai	367.860.000	367.860.000	0	
	- Tunjangan Kepala Desa	36.000.000	36.000.000	0	
	- Tunjangan Sekretaris Desa	5.040.000	5.040.000	0	
	- Tunjangan Kaur Keuangan	28.800.000	28.800.000	0	
	- Tunjangan Kaur Umum	28.800.000	28.800.000	0	
	- Tunjangan Kaur Perencanaan	28.800.000	28.800.000	0	
	- Tunjangan Kasi Pemerintahan	28.800.000	28.800.000	0	
	- Tunjangan Kasi Pembangunan	28.800.000	28.800.000	0	
	- Tunjangan Kasi Ekokesra	28.800.000	28.800.000	0	
	- Tunjangan Bendahara Desa	31.380.000	31.380.000	0	
	- Tunjangan Kadus Lonrong	28.800.000	28.800.000	0	
	- Tunjangan Kadus Jampu	28.800.000	28.800.000	0	
	- Tunjangan Kadus Lenrang	28.800.000	28.800.000	0	
	- Tunjangan Ketua BPD	6.800.000	6.800.000	0	
	- Tunjangan Wakil Ketua BPD	5.400.000	5.400.000	0	
	- Tunjangan Sekretaris BPD	5.040.000	5.040.000	0	
	- Tunjangan Anggota BPD I	4.800.000	4.800.000	0	
	- Tunjangan Anggota BPD II	4.800.000	4.800.000	0	
	- Tunjangan Anggota BPD III	4.800.000	4.800.000	0	
	- Tunjangan Anggota BPD IV	4.800.000	4.800.000	0	
2.1.02	Operasional Perkantoran	315.595.820	259.789.068	55.806.752	ADD
2.1.02.2	Belanja Barang dan Jasa	102.295.820	96.824.068	5.471.752	
	- Biaya ATK	8.000.000	8.000.000	0	
	- Biaya Cetak dan Penggandaan	4.200.000	4.200.000	0	
	- Biaya Benda Pos	1.020.000	1.020.000	0	
	- Biaya Jilid	600.000	600.000	0	
	- Biaya Makan Minum Harian	18.457.000	18.457.000	0	
	- Biaya Makan Minum Rapat	2.000.000	2.000.000	0	
	- Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000	5.975.000	25.000	
	- Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.146.000	1.190.000	2.956.000	
	- Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	3.000.000	3.000.000	0	
	- Biaya Tabung Gas 3 Kg	612.000	612.000	0	
	- Biaya Listrik	4.781.084	2.772.068	2.009.016	
	- Biaya Pulsa	3.000.000	2.988.000	12.000	
	- Pengadaan Taplak Meja Kantor Desa	2.000.000	2.000.000	0	
	- Pengadaan Calculator	150.000	150.000	0	
	- Pengadaan Pengadaan Peralatan Pecah Belah	1.500.000	1.500.000	0	
	- Pengadaan Alat dan Bahan Kebersihan	800.000	800.000	0	
	- Pengadaan Bingkai Foto Bupati dan Wakil Bupati Soppeng	800.000	800.000	0	

- Biaya Upgrade dan Maintainance	3.920.000	3.920.000	0
- Biaya Website Pemerintahan Desa	6.050.000	6.050.000	0
- Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur Desa	6.720.000	6.720.000	0
- Pengadaan Surat Kabar dan Majalah	1.800.000	1.800.000	0
- Honor Operator Website	1.200.000	1.200.000	0
- Honor Penyimpan Barang	600.000	600.000	0
- Honor Pengurus Barang	600.000	600.000	0
- Honor Konsultan Keuangan	7.250.000	7.250.000	0
- Honor Penanggung Jawab Tim RPJMDesa	450.000	450.000	0
- Honor Ketua Tim RPJMDesa	300.000	300.000	0
- Honor Wakil Ketua Tim RPJMDes	250.000	250.000	0
- Honor Anggota I Tim RPJMDes	200.000	200.000	0
- Honor Anggota II Tim RPJMDes	200.000	200.000	0
- Honor Anggota III Tim RPJMDes	200.000	200.000	0
- Honor Anggota IV Tim RPJMDes	200.000	200.000	0
- Honor Anggota V Tim RPJMDes	200.000	200.000	0
- Honor Anggota VI Tim RPJMDes	200.000	200.000	0
- Honor Anggota VII Tim RPJMDes	200.000	200.000	0
- Honor Anggota VIII Tim RPJMDes	200.000	200.000	0
- Honor Anggota IX Tim RPJMDes	200.000	200.000	0
- Honor Ketua Tim Penyusun LPPD	500.000	500.000	0
- Honor Sekretaris Tim Penyusun LPPD	500.000	500.000	0
- Honor Anggota Tim Penyusun LPPD	500.000	500.000	0
- Honor Penanggung Jawab Tim PTPKD	3.800.000	3.800.000	0
- Honor Kordianator Tim PTPKD	1.200.000	1.200.000	0
- Honor Bendahara Tim PTPKD	900.000	900.000	0
- Honor Seksi Pembangunan Tim PTPKD	900.000	900.000	0
- Honor Seksi Pemerintahan Tim PTPKD	900.000	900.000	0
- Honor Seksi Ekokesra Tim PTPKD	900.000	900.000	0
- Biaya Administrasi Bank	180.000	120.000	60.000
- Belanja ATK Silpa Bank 2015	409.736	0	409.736
2.1.02 . 3 Belanja Modal	213.300.000	162.965.000	50.335.000
- Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2	72.000.000	71.665.000	335.000
- Pengadaan Laptop	8.500.000	8.500.000	0
- Pengadaan Komputer	27.000.000	27.000.000	0
- Pengadaan atau Sewa Tanah/Lahan Sawah	50.000.000	0	50.000.000
- Pengadaan Printer	9.900.000	9.900.000	0
- Pengadaan Sound System	10.500.000	10.500.000	0
- Pengadaan Kulkas Mini	2.100.000	2.100.000	0
- Pengadaan Meja Kantor Desa	2.500.000	2.500.000	0
- Pengadaan Kursi Kerja Kantor Desa	7.200.000	7.200.000	0
- Pengadaan Kursi Rapat Kantor Desa	7.500.000	7.500.000	0
- Pengadaan Lemari Berkas	7.000.000	7.000.000	0
- Pengadaan Pintu Besi Pengaman dan Raling Besi Kantor Desa	4.000.000	4.000.000	0
- Pengadaan Pintu Kaca Kantor Desa	5.100.000	5.100.000	0
2.1.04 Operasional RT/RW	22.920.000	22.920.000	0 ADD
2.1.04 . 2 Belanja Barang dan Jasa	22.920.000	22.920.000	0
- Insentif RT	16.320.000	16.320.000	0
- Insentif RW	6.600.000	6.600.000	0
2.2 Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.053.206.200	1.006.861.870	46.344.330
2.2.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum Pedesaan	78.014.600	75.174.000	2.840.600
2.2.07 . 2 Belanja Barang dan Jasa	28.248.748	25.595.600	2.653.148
- Honor Tim TPK Pemb. Kolam Air Bersih Mabbalae	1.775.000	1.775.000	0
- Penanggung Jawab	450.000	450.000	0
- Ketua	400.000	400.000	0
- Sekretaris	325.000	325.000	0
- Anggota	200.000	200.000	0
- Anggota	200.000	200.000	0
- Anggota	200.000	200.000	0

	- Honor Tim Penerima Hasil Pekerjaan Pemb. Kolam Air Bersih Mabbalae	750.000	750.000	0	
	Ketua	300.000	300.000	0	
	Sekretaris	250.000	250.000	0	
	Anggota	200.000	200.000	0	
	- Biaya Makan Minum Tim Pemb. Kola Air Bersih Mabbalae	1.550.000	1.550.000	0	
	- Biaya Transport/BBM Tim Pemb. Kolam Air Bersih Mabbalae	504.000	504.000	0	
	- Honor Konsultan Perencana Pemb. Kolam Air Bersih Mabbalae	1.347.800	1.347.800	0	
	- Honor Konsultan Pengawas Pemb. Kolam Air Bersih Mabbalae	1.347.800	1.347.800	0	
	- Biaya Sewa Pemb. Kolam Air Bersih Mabbalae	3.350.000	2.781.000	569.000	
	- Biaya Upah Pemb. Kolam Air Bersih Mabbalae	17.474.148	15.390.000	2.084.148	
	- Biaya Papan Nama Kegiatan Pemb. Kolam Air Bersih Mabbalae	150.000	150.000	0	
2.2.07 . 3	Belanja Modal	49.765.852	49.578.400	187.452	
	- Belanja Material Pemb. Kolam Air Bersih Mabbale	49.765.852	49.578.400	187.452	
2.2.11	Pembangunan Dam, Irigasi, Bendungan	219.547.800	212.151.300	7.396.500	ADD
2.2.11 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.065.655	96.678.800	7.386.855	
	- Honor Tim TPK Pemb. Saluran Irigasi Mabbalae Penanggung Jawab	1.775.000	1.775.000	0	
	Ketua	425.000	425.000	0	
	Sekretaris	300.000	300.000	0	
	Anggota	200.000	200.000	0	
	Anggota	200.000	200.000	0	
	Anggota	200.000	200.000	0	
	- Honor Tim Penerima Hasil Pekerjaan Pemb. Saluran Irigasi Mabbalae	750.000	750.000	0	
	Ketua	300.000	300.000	0	
	Sekretaris	250.000	250.000	0	
	Anggota	200.000	200.000	0	
	- Biaya Makan Minum Tim Pemb. Saluran Irigasi Mabbalae	1.550.000	1.550.000	0	
	- Biaya Transport/BBM Tim Pemb. Saluran Irigasi Mabbalae	504.000	504.000	0	
	- Honor Konsultan Perencana Pemb. Saluran Irigasi Mabbalae	3.924.400	3.924.400	0	
	- Honor Konsultan Pengawas Pemb. Saluran Irigasi Mabbalae	3.924.400	3.924.400	0	
	- Biaya Sewa Pemb. Saluran Irigasi Mabbalae	10.650.000	10.611.000	39.000	
	- Biaya Upah Pemb. Saluran Irigasi Mabbalae	80.837.855	73.490.000	7.347.855	
	- Biaya Papan Nama Keagiat Pemb. Saluran Irigasi Mabbalae	150.000	150.000	0	
2.2.11 . 3	Belanja Modal	115.482.145	115.472.500	9.645	
	- Belanja Material Pemb. Saluran Irigasi Mabbalae	115.482.145	115.472.500	9.645	
2.2.11	Pembangunan Dam, Irigasi, Bendungan	150.834.200	145.258.700	5.575.500	ADD
2.2.11 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.754.476	65.184.200	5.570.276	
	- Honor Tim TPK Pemb. Saluran Irigasi Pallae Penanggung Jawab	1.775.000	1.775.000	0	
	Ketua	425.000	425.000	0	
	Sekretaris	300.000	300.000	0	
	Anggota	200.000	200.000	0	
	Anggota	200.000	200.000	0	
	Anggota	200.000	200.000	0	
	- Honor Tim Penerima Hasil Pekerjaan Pemb. Saluran Irigasi Pallae	750.000	750.000	0	

	Ketua	300.000	300.000	0	
	Sekretaris	250.000	250.000	0	
	Anggota	200.000	200.000	0	
	- Biaya Makan Minum Tim Pemb. Saluran Irigasi Mabbalae	1.550.000	1.550.000	0	
	- Biaya Transport/BBM Tim Pemb. Saluran Irigasi Pallae	504.000	504.000	0	
	- Honor Konsultan Perencana Pemb. Saluran Irigasi Pallae	2.812.600	2.812.600	0	
	- Honor Konsultan Pengawas Pemb. Saluran Irigasi Pallae	2.812.600	2.812.600	0	
	- Biaya Upah Pemb. Saluran Irigasi Pallae	60.400.276	54.830.000	5.570.276	
	- Biaya Papan Nama Keagiatan Pemb. Saluran Irigasi Pallae	150.000	150.000	0	
2.2.11.3	Belanja Modal	80.079.724	80.074.500	5.224	
	- Belanja Material Pemb. Saluran Irigasi Pallae	80.079.724	80.074.500	5.224	
2.2.11	Pembangunan Dam, Irigasi, Bendungan	20.328.400	19.613.900	714.500	ADD
2.2.11.2	Belanja Barang dan Jasa	8.326.247	7.618.400	707.847	
	- Biaya Makan Minum Tim Pemb. Talud Samping MTS Lenrang	250.000	250.000	0	
	- Biaya Transport/BBM Tim Pemb. Talud Samping MTS Lenrang	256.000	256.000	0	
	- Honor Konsultan Perencana Pemb. Talud Samping MTS Lenrang	381.200	381.200	0	
	- Honor Konsultan Pengawas Pemb. Talud Samping MTS Lenrang	381.200	381.200	0	
	- Biaya Upah Pemb. Saluran Talud Samping MTS Lenrang	6.907.847	6.200.000	707.847	
	- Biaya Papan Nama Keagiatan Pemb. Talud Samping MTS Lenrang	150.000	150.000	0	
2.2.11.3	Belanja Modal	12.002.153	11.995.500	6.653	
	- Belanja Material Pemb. Talud Samping MTS Lenrang	12.002.153	11.995.500	6.653	
2.2.19	Pemeliharaan Jalan Desa	266.715.800	244.983.050	21.732.750	
2.2.19.2	Belanja Barang dan Jasa	112.927.424	91.205.800	21.721.624	
	- Honor Tim TPK Peningkatan Jln Tani Toddang Talempeng	1.775.000	1.775.000	0	
	- Penanggung Jawab	450.000	450.000	0	
	- Ketua	425.000	425.000	0	
	- Sekretaris	300.000	300.000	0	
	- Anggota	200.000	200.000	0	
	- Anggota	200.000	200.000	0	
	- Anggota	200.000	200.000	0	
	- Honor Tim Penerima Hasil Pekerjaan Peningkatan Jln Tani Toddang Talempeng	750.000	750.000	0	
	- Ketua	300.000	300.000	0	
	- Sekretaris	250.000	250.000	0	
	- Anggota	200.000	200.000	0	
	- Biaya Makan Minum Tim Peningkatan Jln Tani Toddang Talempeng	1.550.000	1.550.000	0	
	- Biaya Transport/BBM Tim Peningkatan Jln Tani Toddang Talempeng	504.000	504.000	0	
	- Honor Konsultan Perencana Peningkatan Jln Tani Toddang Talempeng	4.773.400	4.773.400	0	
	- Honor Konsultan Pengawas Peningkatan Jln Tani Toddang Talempeng	4.773.400	4.773.400	0	
	- Biaya Sewa Peningkatan Jln Tani Toddang Talempeng	13.920.000	0	13.920.000	
	- Biaya Upah Peningkatan Jln Tani Toddang Talempeng	84.731.624	76.930.000	7.801.624	
	- Biaya Papan Nama Kegiatan Peningkatan Jln Tani Toddang Talempeng	150.000	150.000	0	

2.2.19 . 3	Belanja Modal	153.788.376	153.777.250	11.126	
	- Belanja Material Peningkatan Jln Tani Toddang	153.788.376	153.777.250	11.126	
	Talempeng				
2.2.19	Pemeliharaan Jalan Desa	68.635.400	66.464.400	2.171.000	
2.2.19 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.593.068	23.465.400	2.127.668	
	- Honor Tim TPK Pemb. Paving Block Jln	1.775.000	1.775.000	0	
	Matampa Walie				
	Penanggung Jawab	450.000	450.000	0	
	Ketua	425.000	425.000	0	
	Sekretaris	300.000	300.000	0	
	Anggota	200.000	200.000	0	
	Anggota	200.000	200.000	0	
	Anggota	200.000	200.000	0	
	- Honor Tim Penerima Hasil Pekerjaan Pemb.	750.000	750.000	0	
	Paving Block Jln Matampa Walie				
	Ketua	300.000	300.000	0	
	Sekretaris	250.000	250.000	0	
	Anggota	200.000	200.000	0	
	- Biaya Makan Minum Tim Pemb. Paving Block	700.000	700.000	0	
	Jln Matampa Walie				
	- Biaya Transport/BBM Tim Pemb. Paving Block	504.000	504.000	0	
	Jln Matampa Walie				
	- Honor Konsultan Perencana Pemb. Paving Block	1.248.200	1.248.200	0	
	Jln Matampa Walie				
	- Honor Konsultan Pengawas Pemb. Paving Block	1.248.200	1.248.200	0	
	Jln Matampa Walie				
	- Biaya Upah Pemb. Paving Block Jln Matampa	19.217.668	17.090.000	2.127.668	
	Walie				
	- Biaya Papan Nama Kegiatan Pemb. Paving Block	150.000	150.000	0	
	Matampa Walie				
2.2.19 . 3	Belanja Modal	43.042.332	42.999.000	43.332	
	- Belanja Material Pemb. Paving Block Jln	43.042.332	42.999.000	43.332	
	Matampa Walie				
2.2.19	Pemeliharaan Jalan Desa	21.585.600	21.175.600	410.000	
2.2.19 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.163.132	5.775.600	387.532	
	- Biaya Makan Minum Tim Pemb. Jln Beton	250.000	250.000	0	
	A. Pake Lenrang				
	- Biaya Transport/BBM Tim Pemb. Jln Beton	256.000	256.000	0	
	A. Pake Lenrang				
	- Honor Konsultan Perencana Pemb. Jln Beton	386.800	386.800	0	
	A. Pake Lenrang				
	- Honor Konsultan Pengawas Pemb. Jln Beton	386.800	386.800	0	
	A. Pake Lenrang				
	- Biaya Sewa Pemb. Jln Beton A. Pake Lenrang	966.000	966.000	0	
	- Biaya Upah Pemb. Jln Beton A. Pake Lenrang	3.767.532	3.380.000	387.532	
	- Biaya Papan Nama Kejiata Pemb. Jln Beton	150.000	150.000	0	
	A. Pake Lenrang				
2.2.19 . 3	Belanja Modal	15.422.468	15.400.000	22.468	
	- Belanja Material Pemb. Jln Beton A. Pake	15.422.468	15.400.000	22.468	
	Lenrang				
2.2.19	Pemeliharaan Jalan Desa	166.069.200	162.139.950	3.929.250	ADD
2.2.19 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.462.761	52.588.200	3.874.561	
	- Honor Tim TPK Pemb. Jln Beton LKMD	1.775.000	1.775.000	0	
	Lenrang				
	Penanggung Jawab	450.000	450.000	0	
	Ketua	425.000	425.000	0	
	Sekretaris	300.000	300.000	0	
	Anggota	200.000	200.000	0	
	Anggota	200.000	200.000	0	

	Anggota	200.000	200.000	0	
	- Honor Tim Penerima Hasil Pekerjaan Pemb.	750.000	750.000	0	
	Jln Beton LKM Lenrang				
	Ketua	300.000	300.000	0	
	Sekretaris	250.000	250.000	0	
	Anggota	200.000	200.000	0	
	- Biaya Makan Minum Tim Pemb. Jln Beton	1.550.000	1.550.000	0	
	LKMD Lenrang				
	- Biaya Transport/BBM Tim Pemb. Jln Beton	504.000	504.000	0	
	LKMD Lenrang				
	- Honor Konsultan Perencana Pemb. Jln Beton	3.009.600	3.009.600	0	
	LKMD Lenrang				
	- Honor Konsultan Pengawas Pemb. Jln Beton	3.009.600	3.009.600	0	
	LKMD Lenrang				
	- Biaya Sewa Pemb. Jln Beton LKMD Lenrang	4.991.000	4.860.000	131.000	
	- Biaya Upah Pemb. Jln Beton LKMD Lenrang	40.723.561	36.980.000	3.743.561	
	- Biaya Papan Nama Kegiatan Pemb. Jln Beton	150.000	150.000	0	
	LKMD Lenrang				
2.2.19 . 3	Belanja Modal	109.606.439	109.551.750	54.689	
	- Belanja Material Pemb. Jln Beton LKMD Lenrang	109.606.439	109.551.750	54.689	
2.2.29	Pembangunan Gedung Kantor	27.997.200	27.280.070	717.130	ADD
2.2.29 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.923.108	8.207.200	715.908	
	- Honor Konsultan Perencana Renovasi Pagar Kantor Desa	533.600	533.600	0	
	- Honor Konsultan Pengawas Renovasi Pagar Kantor Desa	533.600	533.600	0	
	- Biaya Makan Minum Tim Renovasi Pagar Kantor Desa	250.000	250.000	0	
	- Upah Renovasi Pagar Kantor Desa	7.455.908	6.740.000	715.908	
	- Biaya Papan Nama Kegiatan Renovasi Pagar Kantor Desa	150.000	150.000	0	
2.2.29 . 3	Belanja Modal	19.074.092	19.072.870	1.222	
	- Belanja Material Renovasi Pagar Kantor Desa	19.074.092	19.072.870	1.222	
2.2.29	Pembangunan Gedung Kantor	33.478.000	32.620.900	857.100	ADD
2.2.29 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.223.896	9.388.000	835.896	
	- Honor Konsultan Perencana Pemb. Kanopi Kantor Desa	639.000	639.000	0	
	- Honor Konsultan Pengawas Pemb. Kanopi Kantor Desa	639.000	639.000	0	
	- Biaya Makan Minum Tim Pemb. Kanopi Kantor Desa	250.000	250.000	0	
	- Upah Pemb. Kanopi Kantor Desa	8.545.896	7.710.000	835.896	
	- Biaya Papan Nama Kegiatan Pemb. Kanopi Kantor Desa	150.000	150.000	0	
2.2.29 . 3	Belanja Modal	23.254.104	23.232.900	21.204	
	- Belanja Material Pemb. Kanopi Kantor Desa	23.254.104	23.232.900	21.204	
2.3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	74.300.000	69.700.000	4.600.000	
2.3.01	Pembinaan Ketertarikan dan Ketertiban	4.600.000	0	4.600.000	
2.3.01 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000	0	4.600.000	
	- Pembentukan Pemuda Siaga Bencana	4.600.000	0	4.600.000	
2.3.09	Bantuan Keuangan Lembaga Kemasyarakatan	22.000.000	22.000.000	0	ADD
2.3.09 . 3	Belanja Modal	22.000.000	22.000.000	0	
	- Bantuan Keuangan PKK	8.000.000	8.000.000	0	
	- Bantuan Keuangan Majelis Taklim	2.000.000	2.000.000	0	
	- Bantuan Keuangan PAUD	3.000.000	3.000.000	0	
	- Bantuan Keuangan RA (Raudhatul Atfal)	2.000.000	2.000.000	0	
	- Bantuan Keuangan Posyandu	3.000.000	3.000.000	0	
	- Bantuan Keuangan Kegiatan Keagamaan	4.000.000	4.000.000	0	

2.3.11	Pembinaan Kapasitas Keagamaan	43.200.000	43.200.000	0	ADD
2.3.11 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000	43.200.000	0	
	- Insentif Imam Masjid	9.000.000	9.000.000	0	
	- Insentif Guru Mengaji	34.200.000	34.200.000	0	
2.3.13	Pembinaan Karang Taruna	4.500.000	4.500.000	0	ADD
2.3.13 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000	4.500.000	0	
	- Pelatihan Dasar Kepemimpinan Pemuda	4.500.000	4.500.000	0	
2.4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	116.808.881	107.784.400	9.024.481	
2.4.01	Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	34.318.481	25.545.000	8.773.481	
2.4.01 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.318.481	25.545.000	8.773.481	
	- Peningkatan SDM	34.318.481	25.545.000	8.773.481	
2.4.02	Penyusunan Profil Desa	4.044.000	4.043.000	1.000	ADD
2.4.02 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.044.000	4.043.000	1.000	
	- Penanggung Jawab	500.000	500.000	0	
	- Ketua	400.000	400.000	0	
	- Kasi Pemerintahan	300.000	300.000	0	
	- Operator Online Profil Desa	2.000.000	2.000.000	0	
	- Biaya Makan Minum	300.000	300.000	0	
	- Biaya Transport	240.000	240.000	0	
	- Biaya Internet/Pulsa, Kota	304.000	303.000	1.000	
2.4.03	Pelaksanaan Musyawarah Desa	1.620.000	1.620.000	0	ADD
2.4.03 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.620.000	1.620.000	0	
	- Biaya Makan Minum Pra Musrembang	1.620.000	1.620.000	0	
2.4.08	Peningkatan Keamanan dan Ketentraman	68.050.000	67.800.000	250.000	
2.4.08 . 3	Belanja Modal	68.050.000	67.800.000	250.000	
	- Pengadaan Motor Pemadam Kebakaran 3 Roda	68.050.000	67.800.000	250.000	
2.4.09	Kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Desa	5.776.400	5.776.400	0	ADD
2.4.09 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.776.400	5.776.400	0	
	- Insentif Kader Posyandu	5.776.400	5.776.400	0	
2.4.11	Peningkatan Kapasitas LPMD	3.000.000	3.000.000	0	ADD
2.4.11 . 3	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000	3.000.000	0	
	- Operasional LPMD	3.000.000	3.000.000	0	
	JUMLAH BELANJA	1.950.690.901	1.834.915.338	115.775.563	
	SUPRLUS / DEFISIT	134.310.380	251.612.631	-117.302.251	

KEPALA DESA

Ir. SUKMAL

LAMPIRAN 6
LAPORAN APBDesa 2017

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JAMPU
TAHUN ANGGARAN 2017

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)		KET
	PENDAPATAN				
	Pendapatan Asli Desa	280.660.000	285.387.223		
	<i>Hasil Usaha Desa</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>		
	Hasil Usaha Desa Lainnya	400.000	400.000		
	01. Hasil Usaha Desa	400.000	400.000		
	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	280.140.000	280.140.000		
	Hasil Swadaya	245.740.000	245.740.000		
	01. Hasil Swadaya	245.740.000	245.740.000		
	Hasil Gotong Royong	34.400.000	34.400.000		
	01. Hasil Gotong Royong	34.400.000	34.400.000		
	Lain - Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	120.000	4.847.223		
	Bunga Simpanan di Bank	120.000	4.847.223		
	01. Bunga Bank	-	-		
	02. Pendapatan Bunga Bank	120.000	4.847.223		
	Pendapatan Transfer	2.201.096.767	2.201.096.767		
	01. Dana Desa	850.034.205	850.034.205		
	02. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	47.963.079	47.963.079		
	a. Bagi Hasil Pajak	29.381.598	29.381.598		
	b. Retribusi Daerah	18.581.481	18.581.481		
	03. Alokasi Dana Desa	1.303.099.493	1.303.099.493		
	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	12.745.980	12.745.980		
	01. Kelebihan Belanja Tahun 2016	12.745.980	12.745.980		
	JUMLAH PENDAPATAN	2.494.502.747	2.499.229.970		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)		KET
	BELANJA				
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	723.368.586	665.750.468	57.618.118	
	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	355.980.000	355.980.000	-	
	<i>Belanja Pegawai</i>	<i>355.980.000</i>	<i>355.980.000</i>	-	
	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	319.740.000	319.740.000	-	
	Tunjangan BPD dan Anggota	36.240.000	36.240.000	-	
	Kegiatan Operasional Perkantoran	243.291.086	214.167.968	29.123.118	
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>119.755.106</i>	<i>97.921.968</i>	<i>21.833.138</i>	
	Belanja Langganan Bahan Bacaan	1.800.000	1.800.000	-	ADD
	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	9.500.000	7.358.468	2.141.532	ADD
	01. Listrik	6.500.000	4.370.468	2.129.532	
	02. Pulusa	3.000.000	2.988.000	12.000	
	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000	14.925.000	75.000	ADD
	Belanja Benda Pos dan Materai	5.740.000	5.250.000	490.000	ADD
	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	12.200.000	11.300.000	900.000	ADD
	01. Foto Copy	10.700.000	9.900.000	800.000	
	02. Jilid	1.500.000	1.500.000	-	
	Belanja Makan dan Minuman	27.000.000	26.518.000	482.000	ADD
	01. Makan Minum Harian	21.000.000	20.938.000	62.000	
	02. Makan Minum Rapat	6.000.000	5.580.000	420.000	
	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	17.400.000	13.000.000	4.400.000	ADD
	01. PDH	7.500.000	5.500.000	2.000.000	
	02. Putih	9.900.000	7.500.000	2.400.000	
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.000.000	5.034.500	965.500	ADD
	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	816.000	816.000	-	ADD
	Belanja Honorarium Operator Desa	6.600.000	6.600.000	-	ADD
	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000	3.700.000	12.300.000	ADD
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.579.106	1.500.000	79.106	ADD
	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)	120.000	120.000	-	
	Belanja Modal	123.535.980	116.246.000	3.694.000	
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3.300.000	3.000.000	300.000	ADD
	01. Pengadaan Printer	3.300.000	3.000.000	300.000	
	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Laptop	32.000.000	31.730.000	270.000	ADD
	01. Pengadaan Laptop	32.000.000	31.730.000	270.000	
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio/Audio	12.745.980	9.150.000	3.595.980	PENGEMBALIAN
	01. Pengadaan Kamera	12.745.980	9.150.000	3.595.980	
	Belanja Modal Kendaraan Dinas	39.290.000	39.000.000	290.000	ADD
	01. Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua	39.290.000	39.000.000	290.000	
	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	4.500.000	4.500.000	-	
	01. Penambahan Daya Listrik	4.500.000	4.500.000	-	
	Belanja Modal Perlengkapan Kantor	31.700.000	28.866.000	2.834.000	ADD
	01. Pengadaan Umbul - Umbul Kantor	500.000	486.000	14.000	
	02. Pengadaan UPS Kantor	1.700.000	1.700.000	-	
	03. Pengadaan Pintu Kaca Kantor Desa	5.000.000	5.000.000	-	
	04. Pengadaan AC Kantor Desa	14.500.000	12.500.000	2.000.000	
	05. Pengadaan Kursi Rapat Kantor	5.000.000	4.980.000	20.000	
	06. Pengadaan Lemari Berangkas	5.000.000	4.200.000	800.000	

Kegiatan Operasional BPD	10.000.000	1.770.000	8.230.000	
Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	1.770.000	8.230.000	
Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000	-	1.000.000	ADD
Belanja Makan dan Minuman	8.000.000	1.770.000	6.230.000	ADD
Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000	-	1.000.000	ADD
Kegiatan Insentif RT/RW	26.400.000	26.400.000	-	
Belanja Pegawai	26.400.000	26.400.000	-	
Insentif RT/RW	26.400.000	26.400.000	-	
Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa	3.135.000	-	3.135.000	
Belanja Barang dan Jasa	3.135.000	-	3.135.000	
Biaya Hosting/Maintenance Website	3.135.000	-	3.135.000	ADD
Kegiatan Penataan Desa	84.562.500	67.432.500	17.130.000	
Belanja Barang dan Jasa	84.562.500	67.432.500	17.130.000	
Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	84.562.500	67.432.500	17.130.000	
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.681.469.881	1.581.147.325	100.322.556	
Kegiatan Pembangunan Jalan Desa (Rabat Beton Orai Aggolokeng)	162.961.750	134.732.025	18.219.725	
Belanja Barang dan Jasa	4.850.000	4.750.000	100.000	
Belanja Makan dan Minuman	1.450.000	1.400.000	50.000	ADD
Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	1.450.000	1.400.000	50.000	ADD
Belanja Honorarium Tim Panitia	1.950.000	1.950.000	-	ADD
Belanja Modal	148.101.750	129.982.025	18.119.725	
Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	148.101.750	129.982.025	18.119.725	ADD
Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	850.034.205	841.275.900	8.758.305	
Belanja Barang dan Jasa	5.408.330	5.380.000	28.330	
Belanja Makan dan Minuman	1.700.000	1.680.000	20.000	DD
Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	1.759.390	1.750.000	8.330	DD
Belanja Honorarium Tim Panitia	1.950.000	1.950.000	-	
Belanja Modal	844.625.875	835.895.900	8.729.975	
Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	844.625.875	835.895.900	8.729.975	DD
Kegiatan Pembangunan Dam, Irigasi, Bendungan (Saluran Irigasi Ilau Bolae)	159.206.900	124.611.475	34.595.425	
Belanja Barang dan Jasa	4.850.000	4.750.000	100.000	
Belanja Makan dan Minuman	1.450.000	1.400.000	50.000	ADD
Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	1.450.000	1.400.000	50.000	ADD
Belanja Honorarium Tim Panitia	1.950.000	1.950.000	-	ADD
Belanja Modal	154.356.900	119.861.475	34.495.425	
Belanja Modal Pembangunan Dam, Irigasi, Bendungan	154.356.900	119.861.475	34.495.425	ADD
Kegiatan Pembangunan Dam, Irigasi, Bendungan (Saluran Air dp. Rmh. Farida 2)	68.233.400	57.498.700	10.734.700	
Belanja Barang dan Jasa	3.550.000	3.550.000	-	
Belanja Makan dan Minuman	800.000	800.000	-	
Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	800.000	800.000	-	
Belanja Honorarium Tim Panitia	1.950.000	1.950.000	-	
Belanja Modal	64.683.400	53.948.700	10.734.700	
Belanja Modal Pembangunan Dam, Irigasi, Bendungan	64.683.400	53.948.700	10.734.700	ADD
Kegiatan Pembangunan Dam, Irigasi, Bendungan (Saluran Air Farida I)	29.381.598	25.625.650	3.755.948	
Belanja Barang dan Jasa	2.623.298	2.615.000	8.298	
Belanja Makan dan Minuman	750.000	750.000	-	BHP
Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	873.298	665.000	8.298	BHP
Belanja Honorarium Tim Panitia	1.200.000	1.200.000	-	BHP
Belanja Modal	26.758.300	23.010.650	3.747.650	
Belanja Modal Pembangunan Dam, Irigasi, Bendungan	26.758.300	23.010.650	3.747.650	BHP
Kegiatan Pembangunan Dam, Irigasi, Bendungan (Saluran Air Farida I)	18.581.481	16.097.025	2.484.456	
Belanja Barang dan Jasa	1.399.581	1.390.000	9.581	
Belanja Makan dan Minuman	700.000	700.000	-	RTD
Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	699.581	690.000	9.581	RTD
Belanja Honorarium Tim Panitia	-	-	-	RTD
Belanja Modal	17.181.900	14.707.025	2.474.875	
Belanja Modal Pembangunan Dam, Irigasi, Bendungan	17.181.900	14.707.025	2.474.875	RTD
Kegiatan Pembangunan Dam, Irigasi, Bendungan	30.714.747	27.755.550	2.959.197	
Belanja Barang dan Jasa	1.209.447	1.200.000	9.447	
Belanja Makan dan Minuman	700.000	700.000	-	SILPA DD 2016
Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	509.447	500.000	9.447	SILPA DD 2016
Belanja Honorarium Tim Panitia	-	-	-	
Belanja Modal	29.505.300	26.555.550	2.949.750	
Belanja Modal Pembangunan Dam, Irigasi, Bendungan	29.505.300	26.555.550	2.949.750	SILPA DD 2016
Kegiatan Pengerukan Sungai	92.225.800	73.411.000	18.814.800	
Belanja Barang dan Jasa	4.850.000	4.750.000	100.000	
Belanja Makan dan Minuman	1.450.000	1.400.000	50.000	ADD
Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	1.450.000	1.400.000	50.000	ADD
Belanja Honorarium Tim Panitia	1.950.000	1.950.000	-	ADD
Belanja Modal	87.375.800	68.661.000	18.714.800	
Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air	87.375.800	68.661.000	18.714.800	ADD
SWD	280.140.000	280.140.000		
Belanja Barang dan Jasa				
SWD				

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	141.700.000	126.700.000	15.000.000	
Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	5.000.000	-	5.000.000	
Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	-	5.000.000	
Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	5.000.000	-	5.000.000	ADD
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal LPMD	3.000.000	3.000.000	-	
Belanja Barang dan Jasa	3.000.000	3.000.000	-	
Operasional LPMD	3.000.000	3.000.000	-	ADD
Kegiatan Bantuan Keuangan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000	25.000.000	5.000.000	
Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	25.000.000	5.000.000	
Bantuan Keuangan Karangtaruna	5.000.000	5.000.000	-	ADD
Bantuan Keuangan Masjid	20.000.000	20.000.000	-	ADD
Bantuan Operasional BKD/BKAD	5.000.000	-	5.000.000	ADD
Kegiatan Operasional, Pendidikan dan Pelatihan Formal PKK	15.000.000	15.000.000	-	
Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	15.000.000	-	
Biaya Operasional PKK	15.000.000	15.000.000	-	ADD
Kegiatan Pembayaran Insentif Guru Mengaji	30.600.000	30.600.000	-	
Belanja Barang dan Jasa	30.600.000	30.600.000	-	
Insentif Guru Mengaji	30.600.000	30.600.000	-	ADD
Kegiatan Pembayaran Insentif Imam Masjid	12.000.000	12.000.000	-	
Belanja Barang dan Jasa	12.000.000	12.000.000	-	
Insentif Imam Masjid	12.000.000	12.000.000	-	ADD
Kegiatan Pembayaran Insentif Kader Posyandu	13.500.000	13.500.000	-	
Belanja Barang dan Jasa	13.500.000	13.500.000	-	
Insentif Kader Posyandu	13.500.000	13.500.000	-	ADD
Kegiatan Pembayaran Insentif Guru PAUD	12.600.000	12.600.000	-	
Belanja Barang dan Jasa	12.600.000	12.600.000	-	
Insentif Guru PAUD	12.600.000	12.600.000	-	ADD
Kegiatan Pembinaan Kader Pemberdayaan Pembangunan/Teknik Infrastruktur	5.000.000	-	5.000.000	
Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	-	5.000.000	
Biaya Operasional Kader Pemberdayaan Teknik Infrastruktur	5.000.000	-	5.000.000	ADD
Biaya Operasional Majelis Taklim	15.000.000	15.000.000	-	
Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	15.000.000	-	
Biaya Operasional Majelis Taklim	15.000.000	15.000.000	-	ADD
Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan	62.841.527	41.750.000	21.091.527	
Kegiatan Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	38.841.527	20.000.000	18.841.527	
Belanja Barang dan Jasa	38.841.527	20.000.000	18.841.527	
Belanja Pelatihan Peningkatan SDM Kapasitas Aparatur	38.841.527	20.000.000	18.841.527	ADD
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat	24.000.000	21.750.000	2.250.000	
Belanja Barang dan Jasa	24.000.000	21.750.000	2.250.000	
Belanja Pelatihan Peningkatan SDM Lembaga Kemasyarakatan	24.000.000	21.750.000	2.250.000	ADD
Bidang Tak Terduga	2.231.321	-	2.231.321	
Kegiatan Kejadian Luar Biasa	2.231.321	-	2.231.321	
Belanja Barang dan Jasa	2.231.321	-	2.231.321	
Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	50.181	-	50.181	SILPA ADD 2016
Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	1.781.140	-	1.781.140	
Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	400.000	-	400.000	
JUMLAH	2.611.611.315	2.415.347.793		
SURPLUS / (DEFISIT)	- 117.108.568	83.882.177		
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan				
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	117.108.568	117.323.851		
SILPA ADD 2016	84.612.681	84.612.681		
SILPA DD 2016	30.714.747	30.714.747		
BUNGA BANK	1.781.140	1.996.423		
Pengeluaran Pembiayaan	0	0		
Penyertaan Modal Bumdes	0	0		
JUMLAH PEMBIAYAAN	117.108.568	117.323.851		
SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	-	201.206.028		

KEPALA DESA

Ir. SUKMAL

LAMPIRAN 7
LAPORAN APBDesa 2018

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JAMPU
TAHUN ANGGARAN 2018

KODE REK	URAIAN	KET	ANGGARAN PERUBAHAN (RP)
1	2	3	4
1.	PENDAPATAN		
1.1	Pendapatan Asli Desa		366.047.401,00
1.1.1	Hasil Usaha Desa		0,00
	Hasil Usaha Desa Lainnya		0,00
	01. Hasil Usaha Desa	PAD	
1.1.3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		357.761.901,00
	Hasil Swadaya		100.000.000,00
	01. Hasil Swadaya	SWD	100.000.000,00
	Hasil Gotong Royong		257.761.901,00
	01. Hasil Gotong Royong	SWD	257.761.901,00
1.1.4	Lain - lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah		8.285.500,00
	Bunga Simpanan Uang di Bank		8.285.500,00
	01. Bunga Bank	ESTIMASI	8.285.500,00
	02. Pendapatan Bunga Bank	PAD	
1.2	Pendapatan Transfer		2.102.854.185,00
1.2.1	Dana Desa		826.525.406,00
	Dana Desa		826.525.406,00
	01. Dana Desa	DDS	826.525.406,00
1.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		61.899.663,00
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah		61.899.663,00
	01. Bagi Hasil Pajak	BHP	37.389.785,00
	02. Retribusi Daerah	RTD	24.509.878,00
1.2.3	Alokasi Dana Desa		1.214.429.116,00
	Alokasi Dana Desa		1.214.429.116,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1.214.429.116,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah		8.016.403,00
	Lain - lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah		8.016.403,00
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah		8.016.403,00
	01. Kelebihan Belanja Tahun	PAD	14.421.128,00
	JUMLAH PENDAPATAN		2.476.917.969,00
KODE REK	URAIAN	KET	REALISASI (Rp)
	BELANJA		
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		530.604.936,00
	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan		339.060.000,00
	Belanja Pegawai		339.060.000,00
	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		277.980.000,00
	01. Penghasilan Tetap Kepala Desa	ADD	0,00
	02. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	ADD	31.920.000,00
	03. Penghasilan Tetap Kepala Urusan Keuangan	ADD	0,00
	04. Penghasilan Tetap Kepala Urusan Umum	ADD	27.360.000,00
	05. Penghasilan Tetap Kepala Urusan Perencanaan dan Pelaporan	ADD	27.360.000,00
	06. Penghasilan Tetap Kepala Seksi Pemerintahan	ADD	27.360.000,00
	07. Penghasilan Tetap Kepala Seksi Pelayanan	ADD	27.360.000,00
	08. Penghasilan Tetap Kepala Seksi Kesejahteraan	ADD	27.360.000,00
	09. Penghasilan Tetap Kadus Lonrong	ADD	27.360.000,00
	10. Penghasilan Tetap Kadus Jampu	ADD	27.360.000,00
	11. Penghasilan Tetap Kadus Lenrang	ADD	27.360.000,00
	12. Penghasilan Tetap Bendahara Desa	ADD	27.180.000,00
	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa		27.240.000,00
	01. Tunjangan Kepala Desa	ADD	6.480.000,00
	02. Tunjangan Sekretaris Desa	ADD	5.040.000,00
	03. Tunjangan Kepala Urusan Keuangan	ADD	0,00
	04. Tunjangan Kepala Urusan Umum	ADD	1.440.000,00
	05. Tunjangan Kepala Urusan Perencanaan dan Pelaporan	ADD	1.440.000,00
	06. Tunjangan Kepala Seksi Pemerintahan	ADD	1.440.000,00
	07. Tunjangan Kepala Seksi Pelayanan	ADD	1.440.000,00
	08. Tunjangan Kepala Seksi Kesejahteraan	ADD	1.440.000,00
	09. Tunjangan Kepala Dusun Lonrong	ADD	1.440.000,00
	10. Tunjangan Kepala Dusun Jampu	ADD	1.440.000,00
	11. Tunjangan Kepala Dusun Lenrang	ADD	1.440.000,00
	12. Tunjangan Bendahara Desa	ADD	4.200.000,00
	Tunjangan BPD dan Anggotanya		33.840.000,00
	01. Tunjangan Ketua BPD	ADD	6.600.000,00
	02. Tunjangan Wakil Ketua BPD	ADD	5.400.000,00
	03. Tunjangan Sekretaris BPD	ADD	5.040.000,00
	04. Tunjangan Anggota BPD I	ADD	4.800.000,00
	05. Tunjangan Anggota BPD II	ADD	4.800.000,00
	06. Tunjangan Anggota BPD III	ADD	3.600.000,00
	07. Tunjangan Anggota BPD IV	ADD	3.600.000,00
	Kegiatan Operasional Perkantoran		163.876.478,00
	Belanja Barang dan Jasa		139.651.478,00
	Belanja Langganan Bahan Bacaan	182.881.478,00	3.525.000,00
	01. Surat Kabar Indonesia Pos	ADD	1.890.000,00
	02. Surat Kabar Semut Merah	ADD	900.000,00
	03. Surat Kabar Makassar Pena	ADD	735.000,00
	04. Surat Kabar/Kelender Ism	ADD	0,00
	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet		11.776.278,00

	01. Biaya Listrik	SILPA ADD 2017	7.156.278,00
	02. Biaya Telepon	ADD	2.988.000,00
	03. Biaya Internet	ADD	1.632.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor		17.855.000,00
	01. Biaya Alat Tulis Kantor	ADD	17.855.000,00
	Belanja Alat - alat Kebersihan dan Bahan Pembersih		1.100.000,00
	01. Biaya Alat - alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	ADD	1.100.000,00
	Belanja Benda Pos dan Materai		6.000.000,00
	01. Biaya Materai	ADD	6.000.000,00
	01. Biaya Materai	SILPA PAD USAHA	0,00
	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan		14.400.000,00
	01. Biaya Fotocopy	ADD	11.490.000,00
	02. Biaya Jilid	ADD	2.460.000,00
	03. Biaya Cetak Baliho/Spanduk dll	ADD	450.000,00
	Belanja Makan dan Minuman		43.792.000,00
	01. Biaya Makan Minum Harian	ADD	2.810.000,00
	02. Biaya Makan Minum Rapat	ADD	40.982.000,00
	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya		8.250.000,00
	01. Biaya Pakaian Dinas dan Atributnya	ADD	5.500.000,00
	02. Biaya Pakaian Olahraga	ADD	2.750.000,00
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		3.990.000,00
	01. Biaya Service Kendaraan Bermotor	ADD	3.480.000,00
	02. Biaya Perpanjangan STNK	ADD	510.000,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas		9.485.000,00
	01. Biaya BBM	ADD	8.649.000,00
	02. Biaya Tabung Gas 3 Kg	ADD	816.000,00
	Belanja Honorarium Operator Desa		7.200.000,00
	01. Biaya Honor Operator Desa	ADD	7.200.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas		12.178.200,00
	01. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	ADD	8.135.000,00
	02. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	PAD BUNGA BANK 2018	4.043.200,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga		0,00
	01. Biaya Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	ADD	0,00
	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)	ESTIMASI	120.000,00
	01. Biaya ADM Bank		120.000,00
	Belanja Modal		14.225.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Laptop		9.000.000,00
	01. Pengadaan Laptop	ADD	9.000.000,00
	Belanja Modal Perlengkapan Kantor		6.225.000,00
	01. Pengadaan Kursi Rapat Kantor	ADD	6.225.000,00
	02. Pengadaan Gorden Kantor Desa	ADD	0,00
	Kegiatan Operasional BPD		2.605.000,00
	Belanja Barang dan Jasa		2.605.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor		0,00
	01. Biaya Alat Tulis Kantor BPD	ADD	0,00
	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan		0,00
	01. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan BPD	ADD	0,00
	Belanja Makan dan Minuman		930.000,00
	01. Belanja Makan dan Minuman BPD	ADD	930.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas		175.000,00
	01. Belanja Perjalanan Dinas BPD	ADD	175.000,00
	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya		1.500.000,00
	01. Biaya Pakaian Batik BPD	ADD	1.500.000,00
	Kegiatan Insentif RT/RW		26.400.000,00
	Belanja Pegawai		26.400.000,00
	Insentif RT/RW		26.400.000,00
	01. Insentif RT	ADD	19.200.000,00
	02. Insentif RW	ADD	7.200.000,00
	Kegiatan Pembayaran Asuransi Kesehatan dan Tenaga kerja		8.663.458,00
	Belanja Barang dan Jasa		8.663.458,00
	BPJS Kesehatan		7.090.458,00
	01. Bpjs Sekretaris Desa (Yusuf Syarifuddin)	ADD	977.232,00
	02. Bpjs Kaur Umum (Hj. Rosmawati, S.IP)	ADD	873.318,00
	03. Bpjs Kaur Perencanaan & Pelaporan (A. Jusmiati)	ADD	873.318,00
	04. Bpjs Kasi Pemerintahan (Andi Besse Citta, S.Sos)	ADD	0,00
	05. Bpjs Kasi Kesejahteraan (Suherman, S.IP)	ADD	873.318,00
	06. Bpjs Kasi Pelayanan (Abrar Mahyuddin, S.Sos)	ADD	873.318,00
	07. Bpjs Kadus Lonrong (Badaruddin, S.Sos)	ADD	0,00
	08. Bpjs Kadus Jampu (Abd. Kadir)	ADD	873.318,00
	09. Bpjs Kadus Lenrang (Syamsurijal)	ADD	873.318,00
	10. Bpjs Bendahara Desa (Mansur, SE)	ADD	873.318,00
	BPJS Ketenaga Kerjaan		1.573.000,00
	01. Bpjs Ketenaga Kerjaan Sekretaris Desa	ADD	157.300,00
	02. Bpjs Ketenaga Kerjaan Kepala Urusan Umum	ADD	157.300,00
	03. Bpjs Ketenaga Kerjaan Kepala Urusan Perencanaan dan Pelaporan	ADD	157.300,00
	04. Bpjs Ketenaga Kerjaan Kepala Seksi Pemerintahan	ADD	157.300,00
	05. Bpjs Ketenaga Kerjaan Kepala Seksi Pelayanan	ADD	157.300,00
	06. Bpjs Ketenaga Kerjaan Kepala Seksi Kesejahteraan	ADD	157.300,00
	07. Bpjs Ketenaga Kerjaan Kepala Dusun Lonrong	ADD	157.300,00
	08. Bpjs Ketenaga Kerjaan Kepala Dusun Jampu	ADD	157.300,00
	09. Bpjs Kerenaga Kerjaan Kepala Dusun Lenrang	ADD	157.300,00
	10. Bpjs Ketenaga Kerjaan Bendahara Desa	ADD	157.300,00
	Kegiatan Penjaringan Perangkat Desa		0,00
	Belanja Barang dan Jasa		0,00
	Biaya penjaringan dan penyaringan perangkat desa		0,00
	01. Honor Tim Penjaringan Perangkat Desa	SILPA ADD 2017	0,00
	02. Biaya ATK	SILPA ADD 2017	0,00
	02. Biaya Makan Minum	SILPA ADD 2017	0,00
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		1.507.440.001,00

Kegiatan Pembangunan Jalan Desa (Pemb. Rabat Beton Sekitar Lapangan Lenrang)			284.531.900,00
Belanja Barang dan Jasa			4.640.000,00
Belanja Makan dan Minuman			1.050.000,00
01.	Biaya Makan Minum Penanggung Jawab TPK (Kades)	DD	0,00
02.	Biaya Makan Minum Ketua TPK (Suherman)	DD	0,00
03.	Biaya Makan Minum Sekretaris TPK (Kadus)	DD	0,00
04.	Biaya Makan Minum Anggota TPK (Kader Laradi)	DD	0,00
05.	Biaya Makan Minum Anggota TPK (Kader Mansuriadi)	DD	0,00
06.	Biaya Makan Minum Anggota TPK Masyarakat	DD	0,00
07.	Biaya Makan Minum Anggota TPK Masyarakat	DD	0,00
Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas			990.000,00
01.	Biaya BBM/Transport Penanggung Jawab TPK (Kades)	DD	0,00
02.	Biaya BBM/Transport Ketua TPK (Suherman)	DD	0,00
03.	Biaya BBM/Transport Sekretaris TPK (Kadus)	DD	0,00
04.	Biaya BBM/Transport Anggota TPK (Kader)	DD	0,00
05.	Biaya BBM/Transport Anggota TPK (Kader)	DD	0,00
06.	Biaya BBM/Transport Anggota TPK Masyarakat	DD	0,00
07.	Biaya BBM/Transport Anggota TPK Masyarakat	DD	0,00
Belanja Honorarium Tim Panitia			2.600.000,00
01.	Biaya Honor Tim Anggota TPK (Kader Laradi)	DD	650.000,00
02.	Biaya Honor Tim Anggota TPK (Kader Mansuriadi)	DD	650.000,00
03.	Biaya Honor Tim Anggota TPK Masyarakat	DD	650.000,00
04.	Biaya Honor Tim Anggota TPK Masyarakat	DD	650.000,00
Belanja Modal			279.891.900,00
Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa			279.891.900,00
01.	Upah Tukang Batu	DD	8.520.000,00
02.	Upah Pekerja	DD	38.430.000,00
03.	Timbunan Pasir Alas	DD	9.800.000,00
04.	Semen Taha 40 Kg	DD	112.290.000,00
05.	Pasir	DD	14.467.000,00
06.	Batu Pecah	DD	82.733.000,00
07.	Molen	DD	7.248.800,00
08.	Air	DD	1.950.000,00
09.	Kayu Kls IV Perancah	DD	960.000,00
10.	Paku Biasa 2" - 5"	DD	66.900,00
11.	Gerobak	DD	1.115.000,00
12.	Skop	DD	349.200,00
13.	Papan Informasi	DD	150.000,00
14.	Prasasti	DD	250.000,00
15.	Ember	DD	112.000,00
16.	Plastik	DD	1.450.000,00
Kegiatan Pembangunan Jalan Desa (Perkerasan Latrik Jln. Pemukiman Samping Rmh. H. A. Antare)			22.303.600,00
Belanja Barang dan Jasa			980.000,00
Belanja Makan dan Minuman TPK			490.000,00
01.	Biaya Makan Minum Penanggung Jawab TPK (Kades)	ADD	0,00
02.	Biaya Makan Minum Ketua TPK (Suherman)	ADD	0,00
03.	Biaya Makan Minum Sekretaris TPK (Kadus)	ADD	0,00
04.	Biaya Makan Minum Anggota TPK (Kader Laradi)	ADD	0,00
05.	Biaya Makan Minum Anggota TPK (Kader Mansuriadi)	ADD	0,00
06.	Biaya Makan Minum Anggota TPK Masyarakat	ADD	0,00
07.	Biaya Makan Minum Anggota TPK Masyarakat	ADD	0,00
Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas			490.000,00
01.	Biaya BBM/Transport Penanggung Jawab TPK (Kades)	ADD	0,00
02.	Biaya BBM/Transport Ketua TPK (Suherman)	ADD	0,00
03.	Biaya BBM/Transport Sekretaris TPK (Kadus)	ADD	0,00
04.	Biaya BBM/Transport Anggota TPK (Kader)	ADD	0,00
05.	Biaya BBM/Transport Anggota TPK (Kader)	ADD	0,00
06.	Biaya BBM/Transport Anggota TPK Masyarakat	ADD	0,00
07.	Biaya BBM/Transport Anggota TPK Masyarakat	ADD	0,00
Belanja Honorarium Tim Panitia			0,00
01.	Biaya Honor Tim Anggota TPK (Kader Laradi)	ADD	0,00
02.	Biaya Honor Tim Anggota TPK (Kader Mansuriadi)	ADD	0,00
03.	Biaya Honor Tim Anggota TPK Masyarakat	ADD	0,00
04.	Biaya Honor Tim Anggota TPK Masyarakat	ADD	0,00
Belanja Modal			21.323.600,00
Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa			21.323.600,00
01.	Upah Pekerja	ADD	9.090.000,00
02.	Timbunan Latrik	ADD	9.715.000,00
03.	Cangkul	ADD	446.000,00
04.	Linggis	ADD	557.600,00
05.	Skop	ADD	1.115.000,00
06.	Papan Informasi	ADD	150.000,00
07.	Prasasti	ADD	250.000,00
Kegiatan Pembangunan Dam, Irigasi, Bendungan (Pemb. Talud Lenrang IIau)			95.276.500,00
Belanja Barang dan Jasa			4.230.000,00
Belanja Makan dan Minuman			810.000,00
01.	Biaya Makan Minum Penanggung Jawab TPK (Kades)	DD	0,00
02.	Biaya Makan Minum Ketua TPK (Suherman)	DD	0,00
03.	Biaya Makan Minum Sekretaris TPK (Kadus)	DD	0,00
04.	Biaya Makan Minum Anggota TPK (Kader Laradi)	DD	0,00
05.	Biaya Makan Minum Anggota TPK (Kader Mansuriadi)	DD	0,00
06.	Biaya Makan Minum Anggota TPK Masyarakat	DD	0,00
07.	Biaya Makan Minum Anggota TPK Masyarakat	DD	0,00

	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas		820.000,00
	01. Biaya BBM/Transport Penanggung Jawab TPK (Kades)	DD	0,00
	02. Biaya BBM/Transport Ketua TPK (Suherman)	DD	0,00
	03. Biaya BBM/Transport Sekretaris TPK (Kadus)	DD	0,00
	04. Biaya BBM/Transport Anggota TPK (Kader)	DD	0,00
	05. Biaya BBM/Transport Anggota TPK (Kader)	DD	0,00
	06. Biaya BBM/Transport Anggota TPK Masyarakat	DD	0,00
	07. Biaya BBM/Transport Anggota TPK Masyarakat	DD	0,00
	Belanja Honorarium Tim Panitia		2.600.000,00
	01. Biaya Honor Tim Anggota TPK (Kader Laradi)	DD	650.000,00
	02. Biaya Honor Tim Anggota TPK (Kader Mansuriadi)	DD	650.000,00
	03. Biaya Honor Tim Anggota TPK Masyarakat	DD	650.000,00
	04. Biaya Honor Tim Anggota TPK Masyarakat	DD	650.000,00
	Belanja Modal		91.046.500,00
	Belanja Modal Pembangunan Dam, Irigasi, Bendungan		91.046.500,00
	01. Upah Pekerja	DD	20.790.000,00
	02. Upah Tukang	DD	10.800.000,00
	03. Batu	DD	23.946.000,00
	04. Pasir	DD	7.038.000,00
	05. Semen Tonasa 40 Kg	DD	28.072.500,00
	06. Papan Informasi	DD	150.000,00
	07. Prasasti	DD	250.000,00
	08. Tali	DD	0,00
	Kegiatan Pembangunan Dam, Irigasi, Bendungan (Pemb. Talud Sekitar Lapangan Lenrang)		149.478.000,00
	Belanja Barang dan Jasa		4.560.000,00
	Belanja Makan dan Minuman		980.000,00
	01. Biaya Makan Minum Penanggung Jawab TPK (Kades)	DD	0,00
	02. Biaya Makan Minum Ketua TPK (Suherman)	DD	0,00
	03. Biaya Makan Minum Sekretaris TPK (Kadus)	DD	0,00
	04. Biaya Makan Minum Anggota TPK (Kader Laradi)	DD	0,00
	05. Biaya Makan Minum Anggota TPK (Kader Mansuriadi)	DD	0,00
	06. Biaya Makan Minum Anggota TPK Masyarakat	DD	0,00
	07. Biaya Makan Minum Anggota TPK Masyarakat	DD	0,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas		980.000,00
	01. Biaya BBM/Transport Penanggung Jawab TPK (Kades)	DD	0,00
	02. Biaya BBM/Transport Ketua TPK (Suherman)	DD	0,00
	03. Biaya BBM/Transport Sekretaris TPK (Kadus)	DD	0,00
	04. Biaya BBM/Transport Anggota TPK (Kader)	DD	0,00
	05. Biaya BBM/Transport Anggota TPK (Kader)	DD	0,00
	06. Biaya BBM/Transport Anggota TPK Masyarakat	DD	0,00
	07. Biaya BBM/Transport Anggota TPK Masyarakat	DD	0,00
	Belanja Honorarium Tim Panitia		2.600.000,00
	01. Biaya Honor Tim Anggota TPK (Kader Laradi)	DD	650.000,00
	02. Biaya Honor Tim Anggota TPK (Kader Mansuriadi)	DD	650.000,00
	03. Biaya Honor Tim Anggota TPK Masyarakat	DD	650.000,00
	04. Biaya Honor Tim Anggota TPK Masyarakat	DD	650.000,00
	Belanja Modal		144.918.000,00
	Belanja Modal Pembangunan Dam, Irigasi, Bendungan		144.918.000,00
	01. Upah Pekerja	DD	37.170.000,00
	02. Upah Tukang Batu	DD	17.400.000,00
	03. Batu Gunung	DD	38.068.000,00
	04. Semen Tonasa 40 Kg	DD	35.480.000,00
	05. Pasir Pasang	DD	11.730.000,00
	06. Timbunan Latrik	DD	4.690.000,00
	07. Papan Informasi	DD	150.000,00
	08. Prasasti	DD	250.000,00
	Kegiatan Pembangunan Dam, Irigasi, Bendungan (Pemb. Saluran Air Tarempeng'e)		160.475.000,00
	Belanja Barang dan Jasa		4.580.000,00
	Belanja Makan dan Minuman TPK		990.000,00
	01. Biaya Makan Minum Penanggung Jawab TPK (Kades)	DD	0,00
	02. Biaya Makan Minum Ketua TPK (Suherman)	DD	0,00
	03. Biaya Makan Minum Sekretaris TPK (Kadus)	DD	0,00
	04. Biaya Makan Minum Anggota TPK (Kader Laradi)	DD	0,00
	05. Biaya Makan Minum Anggota TPK (Kader Mansuriadi)	DD	0,00
	06. Biaya Makan Minum Anggota TPK Masyarakat	DD	0,00
	07. Biaya Makan Minum Anggota TPK Masyarakat	DD	0,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas		990.000,00
	01. Biaya BBM/Transport Penanggung Jawab TPK (Kades)	DD	0,00
	02. Biaya BBM/Transport Ketua TPK (Suherman)	DD	0,00
	03. Biaya BBM/Transport Sekretaris TPK (Kadus)	DD	0,00
	04. Biaya BBM/Transport Anggota TPK (Kader)	DD	0,00
	05. Biaya BBM/Transport Anggota TPK (Kader)	DD	0,00
	06. Biaya BBM/Transport Anggota TPK Masyarakat	DD	0,00
	07. Biaya BBM/Transport Anggota TPK Masyarakat	DD	0,00
	Belanja Honorarium Tim Panitia		2.600.000,00
	01. Biaya Honor Tim Anggota TPK (Kader Laradi)	DD	650.000,00
	02. Biaya Honor Tim Anggota TPK (Kader Mansuriadi)	DD	650.000,00
	03. Biaya Honor Tim Anggota TPK Masyarakat	DD	650.000,00
	04. Biaya Honor Tim Anggota TPK Masyarakat	DD	650.000,00
	Belanja Modal		155.895.000,00
	Belanja Modal Pembangunan Dam, Irigasi, Bendungan		155.895.000,00
	01. Upah Pekerja	DD	30.330.000,00
	02. Upah Tukang Batu	DD	21.480.000,00
	03. Batu Gunung	DD	41.138.000,00
	05. Pasir Pasang	DD	12.903.000,00
	04. Semen Tonasa 40 Kg	DD	48.644.000,00
	05. Papan Informasi	DD	150.000,00
	06. Prasasti	DD	250.000,00
	Kegiatan Pembangunan Dam, Irigasi, Bendungan (Saluran Air Ilau Bolae)		75.272.000,00
	Belanja Barang dan Jasa		3.800.000,00
	Belanja Makan dan Minuman TPK		600.000,00
	01. Biaya Makan Minum Penanggung Jawab TPK (Kades)	ADD	0,00
	02. Biaya Makan Minum Ketua TPK (Suherman)	ADD	0,00
	03. Biaya Makan Minum Sekretaris TPK (Kadus)	ADD	0,00
	04. Biaya Makan Minum Anggota TPK (Kader Laradi)	ADD	0,00
	05. Biaya Makan Minum Anggota TPK (Kader Mansuriadi)	ADD	0,00
	06. Biaya Makan Minum Anggota TPK Masyarakat	ADD	0,00
	07. Biaya Makan Minum Anggota TPK Masyarakat	ADD	0,00

	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	ADD	600.000,00
	01. Biaya BBM/Transport Penanggung Jawab TPK (Kades)	ADD	0,00
	02. Biaya BBM/Transport Ketua TPK (Suherman)	ADD	0,00
	03. Biaya BBM/Transport Sekretaris TPK (Kadus)	ADD	0,00
	04. Biaya BBM/Transport Anggota TPK (Kader)	ADD	0,00
	05. Biaya BBM/Transport Anggota TPK (Kader)	ADD	0,00
	06. Biaya BBM/Transport Anggota TPK Masyarakat	ADD	0,00
	07. Biaya BBM/Transport Anggota TPK Masyarakat	ADD	0,00
	Belanja Honorarium Tim Panitia		2.600.000,00
	01. Biaya Honor Tim Anggota TPK (Kader Laradi)	ADD	650.000,00
	02. Biaya Honor Tim Anggota TPK (Kader Mansuriadi)	ADD	650.000,00
	03. Biaya Honor Tim Anggota TPK Masyarakat	ADD	650.000,00
	04. Biaya Honor Tim Anggota TPK Masyarakat	ADD	650.000,00
	Belanja Modal		71.472.000,00
	Belanja Modal Pembangunan Dam, Irigasi, Bendungan		71.472.000,00
	01. Upah Pekerja	ADD	13.590.000,00
	02. Upah Tukang Batu	ADD	8.280.000,00
	03. Batu Gunung	ADD	14.736.000,00
	05. Pasir Pasang	ADD	4.692.000,00
	04. Semen Tonasa 40 Kg	ADD	20.094.000,00
	05. Upah Langsiran Batu	ADD	6.000.000,00
	06. Upah Langsiran Pasir	ADD	3.000.000,00
	07. Upah Langsiran Semen	ADD	680.000,00
	08. Papan Informasi	ADD	150.000,00
	09. Prasasti	ADD	250.000,00
	Kegiatan Pembangunan Dam, Irigasi, Bendungan (Saluran Air Kampong Baru)		226.299.000,00
	Belanja Barang dan Jasa		5.720.000,00
	Belanja Makan dan Minuman TPK	ADD	1.560.000,00
	01. Biaya Makan Minum Penanggung Jawab TPK (Kades)	ADD	0,00
	02. Biaya Makan Minum Ketua TPK (Suherman)	ADD	0,00
	03. Biaya Makan Minum Sekretaris TPK (Kadus)	ADD	0,00
	04. Biaya Makan Minum Anggota TPK (Kader Laradi)	ADD	0,00
	05. Biaya Makan Minum Anggota TPK (Kader Mansuriadi)	ADD	0,00
	06. Biaya Makan Minum Anggota TPK Masyarakat	ADD	0,00
	07. Biaya Makan Minum Anggota TPK Masyarakat	ADD	0,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	ADD	1.560.000,00
	01. Biaya BBM/Transport Penanggung Jawab TPK (Kades)	ADD	0,00
	02. Biaya BBM/Transport Ketua TPK (Suherman)	ADD	0,00
	03. Biaya BBM/Transport Sekretaris TPK (Kadus)	ADD	0,00
	04. Biaya BBM/Transport Anggota TPK (Kader)	ADD	0,00
	05. Biaya BBM/Transport Anggota TPK (Kader)	ADD	0,00
	06. Biaya BBM/Transport Anggota TPK Masyarakat	ADD	0,00
	07. Biaya BBM/Transport Anggota TPK Masyarakat	ADD	0,00
	Belanja Honorarium Tim Panitia		2.600.000,00
	01. Biaya Honor Tim Anggota TPK (Kader Laradi)	ADD	650.000,00
	02. Biaya Honor Tim Anggota TPK (Kader Mansuriadi)	ADD	650.000,00
	03. Biaya Honor Tim Anggota TPK Masyarakat	ADD	650.000,00
	04. Biaya Honor Tim Anggota TPK Masyarakat	ADD	650.000,00
	Belanja Modal		220.549.000,00
	Belanja Modal Pembangunan Dam, Irigasi, Bendungan		220.549.000,00
	01. Upah Pekerja	ADD	39.430.000,00
	02. Upah Tukang Batu	ADD	17.880.000,00
	03. Batu Gunung	ADD	47.892.000,00
	05. Pasir Pasang	ADD	14.858.000,00
	04. Semen Tonasa 40 Kg	ADD	58.509.000,00
	05. Upah Langsiran Batu	ADD	27.300.000,00
	06. Upah Langsiran Pasir	ADD	13.300.000,00
	07. Upah Langsiran Semen	ADD	1.980.000,00
	08. Papan Informasi	ADD	150.000,00
	09. Prasasti	ADD	250.000,00
	Kegiatan Pembangunan Dam, Irigasi, Bendungan (Saluran Irigasi Kalasse)		22.536.000,00
	Belanja Barang dan Jasa		1.000.000,00
	Belanja Makan dan Minuman TPK		500.000,00
	01. Biaya Makan Minum Penanggung Jawab TPK (Kades)	BHP	-
	02. Biaya Makan Minum Ketua TPK (Suherman)	BHP	0,00
	03. Biaya Makan Minum Sekretaris TPK (Kadus)	BHP	0,00
	04. Biaya Makan Minum Anggota TPK (Kader Laradi)	BHP	0,00
	05. Biaya Makan Minum Anggota TPK (Kader Mansuriadi)	BHP	0,00
	06. Biaya Makan Minum Anggota TPK Masyarakat	BHP	0,00
	07. Biaya Makan Minum Anggota TPK Masyarakat	BHP	0,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas		500.000,00
	01. Biaya BBM/Transport Penanggung Jawab TPK (Kades)	BHP	0,00
	02. Biaya BBM/Transport Ketua TPK (Suherman)	BHP	0,00
	03. Biaya BBM/Transport Sekretaris TPK (Kadus)	BHP	0,00
	04. Biaya BBM/Transport Anggota TPK (Kader)	BHP	0,00
	05. Biaya BBM/Transport Anggota TPK (Kader)	BHP	0,00
	06. Biaya BBM/Transport Anggota TPK Masyarakat	BHP	0,00
	07. Biaya BBM/Transport Anggota TPK Masyarakat	BHP	0,00
	Belanja Honorarium Tim Panitia		0,00
	01. Biaya Honor Tim Anggota TPK (Kader Laradi)	BHP	0,00
	02. Biaya Honor Tim Anggota TPK (Kader Mansuriadi)	BHP	0,00
	03. Biaya Honor Tim Anggota TPK Masyarakat	BHP	0,00
	04. Biaya Honor Tim Anggota TPK Masyarakat	BHP	0,00
	Belanja Modal		21.536.000,00
	Belanja Modal Pembangunan Dam, Irigasi, Bendungan		21.536.000,00
	01. Upah Pekerja	BHP	4.590.000,00
	02. Upah Tukang Batu	BHP	2.160.000,00
	03. Batu Gunung	BHP	4.912.000,00
	03. Semen	BHP	5.910.000,00
	04. Pasir Pasang	BHP	1.564.000,00

	05. Papan Informasi	BHP	150.000,00
	06. Prasasti	BHP	250.000,00
	07. Upah Langsiran Pasir Pasang	BHP	600.000,00
	08. Upah Langsiran Batu Gunung	BHP	1.200.000,00
	09. Upah Langsiran Semen	BHP	200.000,00
	Kegiatan Pembangunan Dam, Irigasi, Bendungan (Saluran Irigasi Kalasse)		14.936.700,00
	Belanja Barang dan Jasa		500.000,00
	Belanja Makan dan Minuman TPK		0,00
	01. Biaya Makan Minum Penanggung Jawab TPK (Kades)	RTD	0,00
	02. Biaya Makan Minum Ketua TPK (Suherman)	RTD	0,00
	03. Biaya Makan Minum Sekretaris TPK (Kadus)	RTD	0,00
	04. Biaya Makan Minum Anggota TPK (Kader Laradi)	RTD	0,00
	05. Biaya Makan Minum Anggota TPK (Kader Mansuriadi)	RTD	0,00
	06. Biaya Makan Minum Anggota TPK Masyarakat	RTD	0,00
	07. Biaya Makan Minum Anggota TPK Masyarakat	RTD	0,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas		500.000,00
	01. Biaya BBM/Transport Penanggung Jawab TPK (Kades)	RTD	0,00
	02. Biaya BBM/Transport Ketua TPK (Suherman)	RTD	0,00
	03. Biaya BBM/Transport Sekretaris TPK (Kadus)	RTD	0,00
	04. Biaya BBM/Transport Anggota TPK (Kader)	RTD	0,00
	05. Biaya BBM/Transport Anggota TPK (Kader)	RTD	0,00
	06. Biaya BBM/Transport Anggota TPK Masyarakat	RTD	0,00
	07. Biaya BBM/Transport Anggota TPK Masyarakat	RTD	0,00
	Belanja Honorarium Tim Panitia		0,00
	01. Biaya Honor Tim Anggota TPK (Kader Laradi)	RTD	0,00
	02. Biaya Honor Tim Anggota TPK (Kader Mansuriadi)	RTD	0,00
	03. Biaya Honor Tim Anggota TPK Masyarakat	RTD	0,00
	04. Biaya Honor Tim Anggota TPK Masyarakat	RTD	0,00
	Belanja Modal		14.436.700,00
	Belanja Modal Pembangunan Dam, Irigasi, Bendungan		14.436.700,00
	01. Upah Pekerja	RTD	3.060.000,00
	02. Upah Tukang Batu	RTD	1.440.000,00
	03. Batu Gunung	RTD	3.070.000,00
	03. Semen	RTD	3.959.700,00
	04. Pasir Pasang	RTD	1.173.000,00
	05. Papan Informasi	RTD	150.000,00
	06. Prasasti	RTD	250.000,00
	07. Upah Langsiran Pasir Pasang	RTD	450.000,00
	08. Upah Langsiran Batu Gunung	RTD	750.000,00
	09. Upah Langsiran Semen	RTD	134.000,00
	Kegiatan Plat Dueker (sekitar rumah H. A. Antare)		9.461.100,00
	Belanja Barang dan Jasa		0,00
	Belanja Makan dan Minuman TPK		0,00
	01. Biaya Makan Minum Penanggung Jawab TPK (Kades)	SILPA DD 2017	0,00
	02. Biaya Makan Minum Ketua TPK (Suherman)	SILPA DD 2017	0,00
	03. Biaya Makan Minum Sekretaris TPK (Kadus)	SILPA DD 2017	0,00
	04. Biaya Makan Minum Anggota TPK (Kader Laradi)	SILPA DD 2017	0,00
	05. Biaya Makan Minum Anggota TPK (Kader Mansuriadi)	SILPA DD 2017	0,00
	06. Biaya Makan Minum Anggota TPK Masyarakat	SILPA DD 2017	0,00
	07. Biaya Makan Minum Anggota TPK Masyarakat	SILPA DD 2017	0,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas		0,00
	01. Biaya BBM/Transport Penanggung Jawab TPK (Kades)	SILPA DD 2017	0,00
	02. Biaya BBM/Transport Ketua TPK (Suherman)	SILPA DD 2017	0,00
	03. Biaya BBM/Transport Sekretaris TPK (Kadus)	SILPA DD 2017	0,00
	04. Biaya BBM/Transport Anggota TPK (Kader)	SILPA DD 2017	0,00
	05. Biaya BBM/Transport Anggota TPK (Kader)	SILPA DD 2017	0,00
	06. Biaya BBM/Transport Anggota TPK Masyarakat	SILPA DD 2017	0,00
	07. Biaya BBM/Transport Anggota TPK Masyarakat	SILPA DD 2017	0,00
	Belanja Honorarium Tim Panitia		0,00
	01. Biaya Honor Tim Anggota TPK (Kader Laradi)	SILPA DD 2017	0,00
	02. Biaya Honor Tim Anggota TPK (Kader Mansuriadi)	SILPA DD 2017	0,00
	03. Biaya Honor Tim Anggota TPK Masyarakat	SILPA DD 2017	0,00
	04. Biaya Honor Tim Anggota TPK Masyarakat	SILPA DD 2017	0,00
	Belanja Modal		9.461.100,00
	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air	6.731.100,00	9.461.100,00
	01. Upah Kerja	SILPA DD 2017	1.890.000,00
	02. Upah Tukang	SILPA DD 2017	840.000,00
	03. Batu Gunung	SILPA DD 2017	1.228.000,00
	04. Pasir	SILPA DD 2017	782.000,00
	05. Semen Tonasa 40 Kg	SILPA DD 2017	1.950.300,00
	06. Kayu Terentang	SILPA DD 2017	579.800,00
	07. Paku Biasa 2" - 5"	SILPA DD 2017	44.600,00
	08. Besi 12	SILPA DD 2017	1.226.500,00
	09. Kawat Beton	SILPA DD 2017	27.900,00
	10. Batu Pecah	SILPA DD 2017	892.000,00
	Kegiatan Pembangunan Jambang Keluarga		89.138.300,00
	Belanja Barang dan Jasa		0,00
	Belanja Makan dan Minuman TPK		0,00
	01. Biaya Makan Minum Penanggung Jawab TPK (Kades)	SILPA ADD 2017	0,00
	02. Biaya Makan Minum Ketua TPK (Suherman)	SILPA ADD 2017	0,00
	03. Biaya Makan Minum Sekretaris TPK (Kadus)	SILPA ADD 2017	0,00
	04. Biaya Makan Minum Anggota TPK (Kader Laradi)	SILPA ADD 2017	0,00
	05. Biaya Makan Minum Anggota TPK (Kader Mansuriadi)	SILPA ADD 2017	0,00
	06. Biaya Makan Minum Anggota TPK Masyarakat	SILPA ADD 2017	0,00
	07. Biaya Makan Minum Anggota TPK Masyarakat	SILPA ADD 2017	0,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas		0,00
	01. Biaya BBM/Transport Penanggung Jawab TPK (Kades)	SILPA ADD 2017	0,00
	02. Biaya BBM/Transport Ketua TPK (Suherman)	SILPA ADD 2017	0,00
	03. Biaya BBM/Transport Sekretaris TPK (Kadus)	SILPA ADD 2017	0,00
	04. Biaya BBM/Transport Anggota TPK (Kader)	SILPA ADD 2017	0,00

	05. Biaya BBM/Transport Anggota TPK (Kader)	SILPA ADD 2017	0,00
	06. Biaya BBM/Transport Anggota TPK Masyarakat	SILPA ADD 2017	0,00
	07. Biaya BBM/Transport Anggota TPK Masyarakat	SILPA ADD 2017	0,00
	Belanja Honorarium Tim Panitia		0,00
	01. Biaya Honor Tim Anggota TPK (Kader Laradi)	SILPA ADD 2017	0,00
	02. Biaya Honor Tim Anggota TPK (Kader Mansuriadi)	SILPA ADD 2017	0,00
	03. Biaya Honor Tim Anggota TPK Masyarakat	SILPA ADD 2017	0,00
	04. Biaya Honor Tim Anggota TPK Masyarakat	SILPA ADD 2017	0,00
	Belanja Modal		89.138.300,00
	Jambang Keluarga		89.138.300,00
	01. Pasir	SILPA ADD 2017	2.737.000,00
	02. Semen	SILPA ADD 2017	8.746.800,00
	03. Batu Pecah	SILPA ADD 2017	6.690.000,00
	04. Besi 10	SILPA ADD 2017	5.850.000,00
	05. Besi 8	SILPA ADD 2017	0,00
	06. Kawat	SILPA ADD 2017	279.000,00
	07. Kayu Kelas 3	SILPA ADD 2017	1.800.000,00
	08. Plywood Tebal 5 mm	SILPA ADD 2017	8.100.000,00
	09. Paku Biasa 2" - 5"	SILPA ADD 2017	111.500,00
	10. Batu Merah	SILPA ADD 2017	1.008.000,00
	11. Klosek Jongkok	SILPA ADD 2017	8.010.000,00
	12. Pipa PVC 3 Inchi	SILPA ADD 2017	5.535.000,00
	13. Sambungan Pipa	SILPA ADD 2017	1.323.000,00
	14. Pipa PVC 1 1/2 Inchi	SILPA ADD 2017	2.205.000,00
	15. Lem	SILPA ADD 2017	133.000,00
	16. Prasasti	SILPA ADD 2017	250.000,00
	17. Papan Informasi	SILPA ADD 2017	150.000,00
	18. Upah Pekerja	SILPA ADD 2017	28.170.000,00
	19. Upah Tukang	SILPA ADD 2017	8.040.000,00
	Swadaya Masyarakat		357.761.901,00
	Belanja Barang dan Jasa		357.761.901,00
	Swadaya Masyarakat		357.761.901,00
	Swadaya Masyarakat	SWADAYA	357.761.901,00
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		108.900.000,00
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal LPMD		3.000.000,00
	Belanja Barang dan Jasa		3.000.000,00
	Operasional LPMD	ADD	3.000.000,00
	Kegiatan Bantuan Keuangan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan		15.000.000,00
	Belanja Barang dan Jasa		15.000.000,00
	Bantuan Keuangan Karangtaruna	SILPA ADD 2017	15.000.000,00
	Kegiatan Operasional, Pendidikan dan Pelatihan Formal PKK		12.000.000,00
	Belanja Barang dan Jasa		12.000.000,00
	Biaya Operasional PKK	ADD	12.000.000,00
	Kegiatan Pembayaran Insentif Guru Mengaji		28.800.000,00
	Belanja Barang dan Jasa		28.800.000,00
	Insentif Guru Mengaji	ADD	28.800.000,00
	Kegiatan Pembayaran Insentif Imam Masjid		11.400.000,00
	Belanja Barang dan Jasa		11.400.000,00
	Insentif Imam Masjid	ADD	11.400.000,00
	Kegiatan Pembayaran Insentif Kader Posyandu		13.500.000,00
	Belanja Barang dan Jasa		13.500.000,00
	Insentif Kader Posyandu	ADD	13.500.000,00
	Kegiatan Pembayaran Insentif Guru PAUD		25.200.000,00
	Belanja Barang dan Jasa		25.200.000,00
	Insentif Guru PAUD	ADD	25.200.000,00
	Kegiatan Pembinaan Kader Pemberdayaan Pembangunan/Teknik Infrastruktur		0,00
	Belanja Barang dan Jasa		0,00
	Biaya Operasional Kader Pemberdayaan Teknik Infrastruktur	ADD	0,00
	Biaya Operasional BKAD		0,00
	Belanja Barang dan Jasa		0,00
	Biaya Operasional BKAD	ADD	0,00
	Biaya Operasional Majelis Taklim		0,00
	Belanja Barang dan Jasa		0,00
	Biaya Operasional Majelis Taklim	ADD	0,00
	Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan		16.526.000,00
	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD		4.400.000,00
	Belanja Barang dan Jasa		4.400.000,00
	Belanja Pelatihan Peningkatan SDM Kapasitas Aparatur		0,00
	Belanja Pelatihan Peningkatan SDM Kapasitas Aparatur	ADD	4.400.000,00
	Belanja Pelatihan Peningkatan SDM Kapasitas Aparatur	SILPA PENGEMBALIAN	0,00
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat		12.126.000,00
	Belanja Barang dan Jasa		12.126.000,00
	Belanja Pelatihan Peningkatan SDM Lembaga Kemasyarakatan		12.126.000,00
	Biaya Pelatihan TPK	SILPA ADD 2017	7.296.000,00
	Biaya Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan	SILPA BHP	0,00
	Biaya Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan	SILPA RTD	0,00
	Biaya Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan	SILPA BUNGA BANK	0,00
	Biaya Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan	SILPA ADD 2017	4.830.000,00
	Biaya Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan	TAMBAHAN BHP	0,00
	Biaya Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan	TAMBAHAN RTD	0,00
	Biaya Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan	TAMBAHAN PENGEMBALIAN	0,00
	Bidang Tak Terduga		0,00
	Kegiatan Kejadian Luar Biasa		0,00
	Belanja Barang dan Jasa		0,00
	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat		0,00
	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat		0,00
	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat		0,00
	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat		0,00
	JUMLAH BELANJA		2.163.470.937,00

	SURPLUS / (DEFISIT)	313.447.052,00
	PEMBIAYAAN	
	Penerimaan Pembiayaan	201.206.028,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	201.206.028,00
	SILPA ADD 2017	172.528.496,00
	SILPA DD 2017	11.717.502,00
	SILPA BHP 2017	3.755.948,00
	SILPA RTD 2017	2.484.456,00
	BUNGA BANK 2017/SILPA BANK 2017	6.723.646,00
	SILPA PAD 2017	400.000,00
	SILPA PAD PENGEMBALIAN 2017	3.595.980,00
	Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Penyertaan Modal Bumdes	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	201.206.028,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	514.653.080,00

KEPALA DESA

Ir. SUKMAL



BIOGRAFI PENULIS



Yayu Sri Eva panggilan Yayu lahir di Jampu pada tanggal 09 Agustus 1997 dari pasangan suami istri Bapak Arifuddin dan Ibu Sudarmi. Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis yaitu RA DDI Mattampawalie lulus tahun 2003, SDN 215 Mattampawalie lulus tahun 2009, SMP Negeri 2 Liliraja lulus tahun 2012, SMA Negeri 1 Liliraja lulus tahun 2015 dan mulai tahun 2015 mengikuti Program S1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.

